



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK
INDONESIA

SPIP RTP

Rencana Tindak Pengendalian

BALAI PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS KENDARI
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pasal 2 disebutkan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Berdasarkan hal itu, BPVP KENDARI berkewajiban menyelenggarakan SPIP sesuai pedoman yang berlaku.

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion yang difasilitasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, BPVP KENDARI telah berhasil membuat dokumen rencana tindak pengendalian yang dimulai dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi komunikasi dan pemantauan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini pada intinya berisi rencana perbaikan pengendalian atas kelemahan lingkungan pengendalian dan berdasarkan penilaian risiko yang ada.

Atas rencana perbaikan pengendalian ini, diharapkan seluruh pegawai BPVP KENDARI mempunyai komitmen yang kuat untuk melaksanakan dan mengimplementasikan rencana perbaikan pengendalian yang telah dibuat. Dengan adanya dokumen rencana tindak pengendalian ini, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPVP KENDARI berjalan dengan efektif, sehingga seluruh target output kegiatan dapat tercapai sesuai perjanjian kerja yang sudah ditetapkan.

KENDARI, Januari 2024

Kepala,

AMRAN,ST

NIP. 19830312 200901 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	3
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Ruang Lingkup.....	4
E. Metodologi.....	4
BAB II PENILAIAN RISIKO	6
A. Gambaran Umum BPVP KENDARI.....	6
11. Identifikasi Tujuan Strategis dan Tujuan Kegiatan.....	7
a. Visi.....	8
b. Misi	8
c. Tujuan.....	9
d. Sasaran Strategis	9
e. Arah Kebijakan, Kerangka Regulasi, Dan Kerangka Kelembagaan.....	11
f. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Ketenagakerjaan.....	13
12. Identifikasi Risiko.....	22
a. Identifikasi risiko atas pelaksanaan kegiatan BPVP KENDARI Tahun 2024 22	
13. Struktur Analisis Risiko	27
a. Skala Dampak Risiko.....	29
b. Skala Kemungkinan Terjadinya Risiko	29
14. Analisa Risiko.....	30
15. Matrik Risiko/ Skala Risiko/ Peta Risiko	41
16. Prioritas Risiko	43
BAB III RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	44
BAB IV INFORMASI DAN KOMUNIKASI	53
BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....	55
BAB VI PENUTUP	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Struktur Organisasi BBPVP KENDARI	7
Gambar 2. 2. Matrik Risiko Kegiatan BPVP KENDARI Tahun 2024	42
Gambar 2. 3.Peta Risiko Kegiatan BPVP KENDARI Tahun 2024	42

DAFTAR TABEL

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN.....	1
Tabel 2.1. Arah Kebijakan dan agenda Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024	13
Tabel 2.2. Perubahan Program Kementerian Ketenagakerjaan	18
Tabel 2.3. Identifikasi Tujuan Strategis BPVP KENDARI.....	19
Tabel 2.4. Identifikasi Tujuan Kegiatan BPVP KENDARI.....	21
Tabel 2.5. Identifikasi Risiko Kegiatan Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan pelatihan Vokasi dan Produktivitas;	24
Tabel 2.6. Identifikasi Risiko Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan,Pelatihan Vokasi dan pemagangan	24
Tabel 2.7. Pengembangan dan peningkatan Produktivitas	25
Tabel 2.8. Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihann Kerja ...	25
Tabel 2.9 Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Binalavotas	26
Tabel 2.10. Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Keahlian.....	26
Tabel 2.13. Perumusan Struktur Analisis Risiko.....	28
Tabel 2.14. Tabel Skala Dampak Risiko.....	29
Tabel 2.15. Tabel Skala Kemungkinan Terjadinya Risiko	30
Tabel 2.16 Nilai skala kemungkinan dan dampak risiko.....	31
Tabel 2.17. Skala Kemungkinan dan Dampak Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Binalavotas	32
Tabel 2.18. Skala Kemungkinan dan Dampak Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan yang Berkualitas	32
Tabel 2.19. Skala Kemungkinan dan Dampak Kegiatan Pelaksanaan Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas	33
Tabel 2.20. Skala Kemungkinan dan Dampak Kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Standarisasi Kompetensi kerja dan pelatihan Kerja	33
Tabel 2.21. Skala Kemungkinan dan Dampak Kegiatan Pelaksanaan Pengembangan sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Binalavotas	33
Tabel 2.22. Skala Kemungkinan dan Dampak Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Pelatihan	34
Tabel 2.23. Skala Kemungkinan dan Dampak Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas.....	34
Tabel 2.24. Skala Kemungkinan dan Dampak Kegiatan Pelaksanaan Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	35
Tabel 2.25. Kategori Level Risiko.....	35
Tabel 2.26. Kategori dan Tingkat Risiko Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Binalavotas	36
Tabel 2.27. Kategori dan Tingkat Risiko Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan yang Berkualitas	37
Tabel 2.28. Kategori dan Tingkat Risiko Kegiatan Pelaksanaan Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas.....	37

Tabel 2.29. Skala Kemungkinan dan Dampak Kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Standarisasi Kompetensi kerja dan pelatihan Kerja	38
Tabel 2.30. Skala Kemungkinan dan Dampak Kegiatan Pelaksanaan Pengembangan sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Binalavotas	38
Tabel 2.31. Skala Kemungkinan dan Dampak Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Pelatihan	39
Tabel 2.32. Skala Kemungkinan dan Dampak Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas.....	39
Tabel 2.33. Skala Kemungkinan dan Dampak Kegiatan Pelaksanaan Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	40
Tabel 3.1. Desain Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Binalavotas	45
Tabel 3.2. Desain Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan yang Berkualitas	46
Tabel 3.3. Desain Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas	47
Tabel 3.4. Desain Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Pengembangan Standarisasi Kompetensi kerja dan pelatihan Kerja	47
Tabel 3.5. Desain Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Pengembangan sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Binalavotas.....	48
Tabel 3.6. Desain Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Pelatihan ivitas	49
Tabel 3.6. Desain Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas	49
Tabel 3.6. Desain Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan SPIP, maka sebagai langkah awal, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari telah menyusun Desain Penyelenggaraan SPIP yang berisi rencana perbaikan lingkungan pengendalian maupun rencana perbaikan pengendalian dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan SPIP yang efektif dan efisien sesuai aturan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah mewajibkan seluruh Kementerian dan Lembaga untuk melakukan pengendalian terhadap seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban secara tertib, terkendali, efisien dan efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada Kementerian dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, serta mengamankan aset negara.

Sistem Pengendalian Intern dilandasi pada pemikiran bahwa sistem pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan dan dipengaruhi oleh sumber daya manusia serta hanya memberikan keyakinan yang memadai bukan keyakinan mutlak.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa pimpinan unit kerja dan satuan kerja wajib menyusun laporan penyelenggaraan SPIP paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Desain Penyelenggaraan SPIP adalah rancangan perbaikan pengendalian yang dilakukan melalui proses pengintegrasian antar unsur SPIP dan pengaturan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam mengembangkan setiap unsur sebagai bentuk konkret penyelenggaraan SPIP. Desain Penyelenggaraan SPIP ini diharapkan dapat memberikan arah

penyelenggaraan SPIP dilingkungan Balai Pelatihan Vokasi dan

Produktivitas Kendari dan menjadi komitmen terutama bagi pimpinan dalam rangka perbaikan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

B. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- b. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
- c. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-688/K/D4/2012 tanggal 25 Mei 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Kepala BPKP Nomor 24 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Control Self Assessment untuk Penilaian Risiko;
- e. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 992);
- f. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024;
- h. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari dimaksudkan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga tercipta tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.

Penyelenggaraan SPIP di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai guna tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah bidang ketenagakerjaan dengan keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

D. Ruang Lingkup

Penyelenggaraan SPIP berdasarkan PP 60 Tahun 2008 dilaksanakan pada tingkat organisasi dan tingkat kegiatan. Ruang lingkup penyelenggaraan SPIP di lingkungan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pimpinan dan masih terbatas pada kegiatan utama serta risiko yang tingkat pengendaliannya belum efektif. Penyusunan penilaian risiko Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari dilakukan dengan tujuan agar misi dan visi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan dapat terlaksana dengan baik.

E. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan desain SPIP pada Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari adalah metode *Focus Group Discussion* (FGD) dengan teknik *Control Self Assessment* (CSA) atau penilaian Pengendalian.

Control Self Assessment (CSA) adalah suatu proses untuk menguji dan menilai efektivitas pengendalian intern yang bertujuan untuk memberi keyakinan bahwa tujuan organisasi akan tercapai. Secara konseptual CSA adalah cara penilaian risiko dan evaluasi atas pengendalian intern yang dilaksanakan sendiri oleh pegawai dan manajemen pada unit kerja yang akan dievaluasi berdasarkan pasal 13 ayat (1) PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah disebutkan bahwa pimpinan instansi wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko tersebut sebagaimana pasal 16, PP No. 60 tahun 2008 menggunakan metodologi yang sesuai dengan mekanisme yang memadai. Oleh karena itu, dalam melakukan penilaian risiko metode CSA merupakan salah satu alternatif

yang dapat digunakan.

Metode CSA yang digunakan untuk mengukur lingkungan pengendalian (*soft control*) adalah dengan *Control Environment Evaluation* (CEE) yaitu mengevaluasi kondisi lingkungan pengendalian yang ada pada suatu organisasi dibandingkan dengan “kondisi ideal” (framework) dari masing-masing sub unsur dalam lingkungan pengendalian dan sebagai bahan bagi manajemen dalam perbaikan lingkungan pengendalian

BAB II

PENILAIAN RISIKO

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan instansi pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi dengan rencana penilaian risiko. Pimpinan unit satuan kerja menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi dengan rencana penilaian risiko. Strategi operasional diwujudkan untuk menentukan kriteria evaluasi yang akan dianalisis sesuai dengan struktur analisis. Struktur analisis risiko dan kriteria evaluasi risiko diharapkan akan menuntun para pihak yang terlibat dalam penilaian risiko mempunyai sudut pandang dan ukuran yang sama.

A. Gambaran Umum BPVP Kendari

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari yang selanjutnya disebut BPVP Kendari merupakan Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

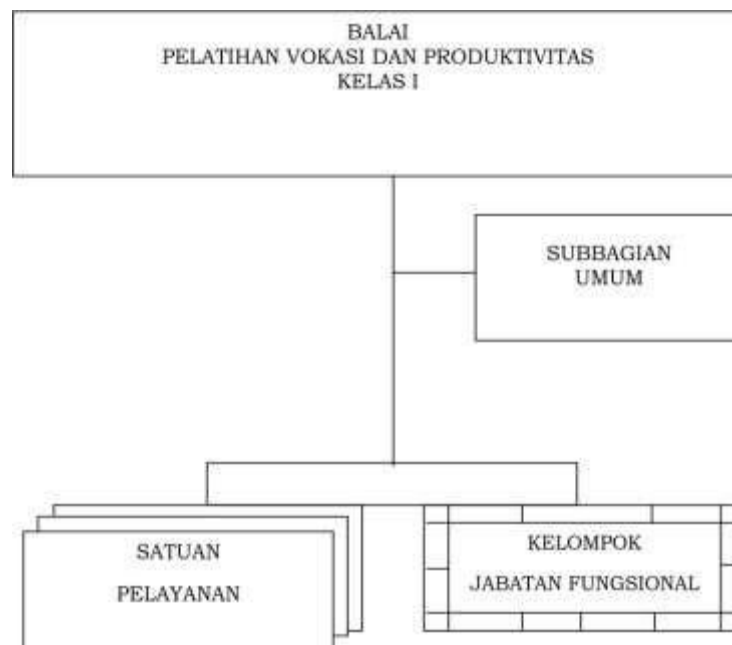
Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I mempunyai tugas melaksanakan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas, sertifikasi kompetensi, serta konsultasi dan peningkatan jejaring di bidang pelatihan vokasi dan produktivitas. Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
2. Pelaksanaan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas;
3. Pelaksanaan fasilitasi pemagangan;
4. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
5. Pelaksanaan konsultasi pelatihan vokasi dan produktivitas;
6. Pelaksanaan peningkatan jejaring pelatihan vokasi dan produktivitas;

7. Pelaksanaan promosi dan pengukuran peningkatan produktivitas;
8. Pelaksanaan pemantauan pelatihan vokasi dan produktivitas;
9. Pelaksanaan urusan organisasi dan sumber daya manusia aparatur, tata laksana, keuangan, rumah tangga, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik negara; dan
10. Penyusunan evaluasi dan pelaporan;

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I terdiri atas : Subbagian Umum; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, persuratan dan kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara.



Gambar 2. 1. Struktur Organisasi BBPVP Kendari

11. Identifikasi Tujuan Strategis dan Tujuan Kegiatan

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024, Visi dan misi Kementerian Ketenagakerjaan

merupakan bagian dari visi dan misi pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan lintas bidang dan pembangunan wilayah demi terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional. Berikut adalah visi dan misi Kementerian Ketenagakerjaan :

a. Visi

Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan visi Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu, “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

b. Misi

Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020- 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 7, nomor 8 dan nomor 9. Upaya yang dilakukan oleh Kementerian

Ketenagakerjaan untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan

negara;

- 2) Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan, dan
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Ketenagakerjaan.

c. Tujuan

Kementerian Ketenagakerjaan memiliki tujuan :

- 1) Mewujudkan tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong;
- 2) Meningkatkan perluasan penempatan tenaga kerja baik dalam dan luar negeri dalam rangka penciptaan lapangan kerja;
- 3) Meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri di masa yang akan datang;
- 4) Mewujudkan visi baru hubungan industrial dan dialog sosial ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya suasana kerja yang kondusif;
- 5) Mewujudkan perluasan dan kualitas perlindungan tenaga kerja yang mendorong produktivitas tenaga kerja berkelanjutan;
- 6) Mewujudkan reformasi birokrasi yang mendorong percepatan investasi dan penciptaan lapangan kerja;
- 7) Mewujudkan tata kelola ketenagakerjaan yang efisien dan efektif dalam menghadapi perubahan dunia yang dinamis.

d. Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan sejumlah sasaran strategis, sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah, produktif, dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung Indonesia yang maju, berdaulat,

mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kontribusi terhadap produktivitas tenaga kerja nasional, di mana kontribusi ini merupakan kontribusi Kementerian Ketenagakerjaan terhadap produktivitas tenaga kerja nasional, yang dihitung berdasarkan besar upah yang diterima penduduk bekerja pada tahun t. Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Utama ini didukung sejumlah indikator kinerja program sebagai berikut:

- a) Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan Kompetensinya dan ditempatkan;
 - b) Jumlah tenaga kerja berkeahlian menengah - tinggi di sektor prioritas yang mendorong daya saing;
 - c) Jumlah tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya;
 - d) Kontribusi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja terhadap penyediaan lapangan kerja;
 - e) Jumlah perusahaan yang menerapkan dan mematuhi norma ketenagakerjaan dan K3;
 - f) Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya;
 - g) Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial;
 - h) Indeks perkembangan kinerja program jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - i) Persentase Pemanfaatan Rencana Tenaga Kerja dan daftar jabatan tenaga kerja menengah - tinggi di sektor prioritas yang mendorong daya saing; dan
 - j) Persentase usulan kebijakan ketenagakerjaan tahun sebelumnya yang diimplementasikan.
- 2) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik. Sasaran strategis diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama, yaitu: Indeks Reformasi Birokrasi, Opini Badan Pemeriksa Keuangan, dan Indeks SPBE. Ketiga indikator ini didukung oleh subindikator kinerja program sebagai berikut:
- a) Indeks dan Nilai Evaluasi PMPRB;

- b) Persentase temuan yang ditindaklanjuti;
- c) Nilai evaluasi SAKIP;
- d) Nilai Kinerja mitra kerja pengawasan internal;
- e) Tingkat maturitas layanan publik instansi pemerintah (termasuk whistle blowing system); dan
- f) Indeks kepuasan layanan data dan informasi ketenagakerjaan.

e. Arah Kebijakan, Kerangka Regulasi, Dan Kerangka Kelembagaan

Selaras dengan agenda pembangunan nasional, arah kebijakan dan strategi Pembangunan Ketenagakerjaan juga merupakan bagian dari arah kebijakan dan strategi Pembangunan tema RPJM 2020-2024 adalah “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan” yang dituangkan ke dalam 7 misi atau agenda pembangunan Ketujuh agenda pembangunan RPJMN IV tahun

2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- 4) Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6) Membangun lingkungan hidup;
- 7) Meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
- 8) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

Dalam hal arah kebijakan dan strategi pembangunan ketenagakerjaan, terdapat 4 (empat) agenda pembangunan RPJMN IV 2020-2024 yang terkait, (i) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; (ii) meningkatkan sumber

daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (iii) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; dan (iv) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

Agenda pembangunan Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas ditujukan dalam rangka meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan sasaran utama peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.

Agenda Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing didasari pada fakta bahwa manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda Penguatan Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Kementerian Ketenagakerjaan akan memastikan pembangunan ketenagakerjaan didukung dengan peningkatan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dalam pembangunan serta rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien.

Agenda Penguatan Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan serta Transformasi Pelayanan Publik ditujukan dalam rangka melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Dalam rangka mendukung agenda tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan akan berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui reformasi

kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik yang berkualitas dan mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

f. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Ketenagakerjaan

Dalam rangka mengakselerasi tujuan pembangunan nasional sebagaimana mandat Presiden dan Wakil Presiden, serta menghadapi kompleksitas tantangan pembangunan ketenagakerjaan dengan mengoptimalkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan yang ada, Menteri Ketenagakerjaan mencanangkan 9 (sembilan) Lompatan Besar Pembangunan Ketenagakerjaan tahun 2020-2024 dengan arah kebijakan dan agenda sesuai tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1. Arah Kebijakan dan agenda Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024

NO	LOMPATAN	ARAH KEBIJAKAN	AGENDA
1	Transformasi BLK	Mengubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional	<p>Reformasi kelembagaan untuk meningkatkan kinerja organisasi BLK yang lebih inovatif dan transformatif</p> <p>Revitalisasi sarana dan prasarana untuk meningkatkan kapasitas, fasilitas, dan keterjangkauan BLK</p> <p>Redesain pelatihan untuk merespon tantangan ketenagakerjaan lokal, nasional, dan internasional</p> <p>Relationship untuk meningkatkan kemitraan dan kolaborasi dengan stakeholders dalam rangka memperkuat kinerja BLK</p>

			Rebranding untuk meningkatkan daya tarik dan kepercayaan publik terhadap BLK
			Reorientasi SDM BLK untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan BLK
2	<i>Link and Match</i> Ketenagakerjaan	Membangun integrasi, pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja dalam sebuah bisnis proses yang utuh dan efektif untuk mempertemukan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja	Pengembangan sistem integrasi pelatihan, sertifikasi, dan Penempatan Penguatan kelembagaan pelayanan pasar kerja lintas-sektor dan unit Penguatan SDM pelatihan, sertifikasi, dan penempatan Penguatan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja Digitalisasi pelayanan pasar kerja Pengembangan kemitraan dan kolaborasi dengan Stakeholders
3	Transformasi Program Perluasan Kesempatan Kerja	Mengembangkan program tenaga kerja mandiri yang efektif untuk membentuk tenaga kerja mandiri dalam rangka memperluas kesempatan kerja yang terukur dan berkelanjutan	Penyusunan desain baru tenaga kerja mandiri Pengembangan sistem pengelolaan program tenaga kerja mandiri Penguatan kelembagaan pelaksana program tenaga kerja mandiri Pengembangan jaringan kemitraan tenaga kerja mandiri
4	Pengembangan Talenta Muda	Mengembangkan dan mengelola potensi kreatif generasi milenial menjadi talenta muda yang siap menyambut <i>future job</i> yang dinamis dan fleksibel	Transformasi <i>Innovation Room</i> menjadi <i>Talent Hub</i> Pengembangan kompetensi talenta muda Perluasan kesempatan kerja untuk talenta Muda Pembentukan <i>Talent Corner</i> di BLK UPTP

			<i>Talent Scouting</i> Inovator Muda
5	Perluasan Pasar Kerja Luar Negeri	Mengembangkan pasar kerja luar negeri dengan memperluas negara penempatan Pekerja Migran Indonesia sektor formal dan memasifikasi pengisian jabatan di sektor formal	Pengembangan sistem market intelligence di negara-negara sasaran PMI
			Perluasan negara-negara penempatan PMI sektor formal, termasuk implementasi <i>Specified Skill Worker (SSW)</i>
			Pengembangan sistem manajemen PMI berbasis digital yang terintegrasi dengan SIAPkerja dan KIK
			Pembenahan standar kompetensi PMI dan proses pelaksanaannya
			Peningkatan kompetensi CPMI, baik melalui pelatihan luring maupun daring
			Penguatan perlindungan hak-hak PMI
6	Visi Baru Hubungan Industrial	Mengembangkan hubungan industrial yang lebih berkualitas dan adil serta berorientasi pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja secara berkelanjutan	Pengembangan inovasi program dalam rangka implementasi UU Cipta Kerja dan aturan turunannya
			Reformasi sistem pengupahan
			Peningkatan harmonitas hubungan dengan SP/SB yang lebih berkualitas
			Penerapan pola hubungan kerja yang adaptif terhadap pasar kerja yang fleksibel
			Penguatan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit dan Tripartit
7	Reformasi Pengawasan Ketenagakerjaan	Meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem pengawasan ketenagakerjaan	Penyusunan rencana kerja bidang pengawasan ketenagakerjaan dan layanan K3

		yang dapat menjamin pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dan K3 yang berintegritas dan kredibel	<p>Pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan yang transparan dan akuntabel</p> <p>Penguatan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan dan K3</p> <p>Pengembangan pelaksanaan pengujian K3</p> <p>Peningkatan kapasitas dan integritas SDM pengawasan ketenagakerjaan dan K3</p> <p>Pengembangan kolaborasi pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dan layanan K3</p> <p>Pengembangan mekanisme audit kinerja Pengawasan</p> <p>Penguatan penegakan hukum (<i>law enforcement</i>) ketenagakerjaan</p>
8	Pengembangan Ekosistem Digital Ketenagakerjaan	Mengembangkan sistem informasi dan pelayanan ketenagakerjaan sebagai ekosistem digital ketenagakerjaan terbesar di Indonesia	<p>Transformasi SISNAKER menjadi Sistem Informasi dan Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPkerja)</p> <p>Integrasi seluruh pelayanan di Kementerian Ketenagakerjaan ke dalam SIAPkerja</p> <p>Pengembangan SIAPkerja sebagai instrumen bagi pembangunan big data untuk mengimplementasikan Satu Data Ketenagakerjaan</p> <p>Penguatan tata kelola SIAPkerja yang kapabel dan efektif</p>

			Pengembangan infrastruktur dan sistem SIAPkerja yang memadai Sinergi platform digital swasta yang bergerak dalam bidang ketenagakerjaan, pelatihan, penempatan, dan platform terkait lainnya ke dalam ekosistem SIAPkerja.
9	Reformasi Birokrasi	Mengembangkan birokrasi yang bersih, akuntabel, profesional, lincah, inovatif, dan responsif untuk mencapai kinerja maksimal dan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima	Manajemen perubahan
			Deregulasi Kebijakan/Peraturan Perundang-Undangan
			Penataan organisasi
			Penataan tata laksana dan pengembangan E Government
			Penataan sumber daya manusia aparatur
			Penguatan akuntabilitas
			Penguatan pengawasan
			Peningkatan kualitas pelayanan publik

Dalam rangka menjalankan agenda dan strategi tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan restrukturisasi program semenjak tahun 2020 yang menunjukkan nomenklatur dan menggambarkan *outcome* dalam pencapaian sasaran pembangunan baik pencapaian yang dilakukan oleh satu Kementerian/Lembaga, maupun antar Kementerian/Lembaga (Lintas K/L). Rumusan program diharapkan dapat mencerminkan *real work (eye-catching)* dan selaras dengan Prioritas Pembangunan dalam RPJMN 2020 - 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan Surat Bersama Deputy Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas dan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor : S122/MK.02/2020 dan Nomor : B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020 untuk melakukan Redesign Program Kementerian Ketenagakerjaan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perubahan Program Kementerian Ketenagakerjaan

SEMULA (PROGRAM EKSISTING)	MENJADI (PROGRAM BARU)
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Dukungan Manajemen Internal
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Riset, Ilmu Pengetahuan, eknologi dan Inovasi
Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	Pembinaan Ketenagakerjaan
Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	

Tabel 2.3. Identifikasi Tujuan Strategis BPVP Kendari

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kegiatan yang mendukung capaian tujuan/sasaran
1	2	3	4	5	6
1.	Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Memberikan Kontribusi Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Nasional	1. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	1. Meningkatnya Jumlah Sarana dan Prasarana yang ditingkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaannya	1. Pembangunan dan/atau Renovasi Sarana Pendukung Pelatihan
					2. Pembangunan dan/atau Renovasi Sarana Pendukung Pelatihan
			2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan	2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan	3. Promosi Pelatihan Vokasi dan Pemagangan
					4. Pemberdayaan Alumni Pelatihan Vokasi dan Pemagangan
					5. Fasilitasi Pelayanan Kios Siap Kerja
					6. Fasilitasi Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri (FKLPI)
			3. Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas	3. Jumlah tenaga kerja yang meningkat produktivitasnya	7. Bimbingan dan Konsultasi Peningkatan Produktivitas
					8. Pengukuran Peningkatan Produktivitas Perusahaan Oleh UPTP
					9. Pelatihan Peningkatan Produktivitas
			4. Terlaksananya Pengembangan Standarisasi Kompetensi	4. Terlaksananya Kompetisi Keahlian/ Keterampilan Tingkat Nasional	10. Kompetisi Keahlian / Keterampilan Tingkat Nasional Pelaksanaan

			Kerja dan Pelatihan Kerja			Seleksi Daerah (SELEKDA ASC/WSC)	
					11	Pengembangan Talenta Muda	
					12	Penyusunan Program dan Modul PBK	
		5.	Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Binalavotas	5.	Jumlah Tenaga Kerja Yang disertifikasi	13	SDM Bidang Sertifikasi yang dilatih
					14	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja	
					15	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Berkeahlian Menengah Tinggi	
		6.	Meningkatnya Kompetensi Instruktur dan Tenaga Pelatihan	6.	Jumlah Instruktur dan Tenaga Pelatihan yang di tingkatkan kompetensinya	16	Pelatihan Peningkatan Karir Instruktur Pemerintah Kompetisi Keahlian / Keterampilan Regional
		7.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas	7.	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan	17	Pelaksanaan PBK di UPTP
					18	PBK BLK Komunitas	
					19	PBK di LPKS	
					20	Pelatihan PFLK	
					21	PBK di UPTD Binaan (PBK Prov. Kalimantan Selatan, PBK Prov, Kalimantan Timur, PBK Prov.	

								Kalimantan Utara)
			8.	Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	8.	Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Internal	22	Layanan Umum Implementasi 5S
							23	Layanan Perkantoran
							24	Layanan Prasarana Internal
							25	Layanan Perencanaan dan Penganggaran
							26	Layanan Majemen Keuangan
							27	Layanan Reformasi Kinerja

Tabel 2.4. Identifikasi Tujuan Kegiatan BPVP Kendari

No	Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Keselarasan dengan tujuan/sasaran strategis	Operasional/ Ketaatan/Keuangan/Aset
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Binalavotas	Selaras	Operasional , Aset
2	Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan yang Berkualitas	Selaras	Operasional
3	Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Selaras	Operasional

4	Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja	Terlaksananya Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja yang berkualitas	Selaras	Operasional
5	Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Binalavotas	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi Kerja	Selaras	Operasional
6	Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Pelatihan	Meningkatnya Kompetensi Instruktur dan Tenaga Pelatihan	Selaras	Operasional
7	Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas	Selaras	Operasional
8	Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Terlaksananya Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Selaras	Keuangan, Aset

12. Identifikasi Risiko

Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pasal 3 Ayat (1) Huruf b menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “penilaian risiko” adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Pimpinan satuan kerja wajib melakukan penilaian risiko melalui identifikasi risiko; dan analisis risiko.

Identifikasi risiko bertujuan untuk menganalisa risiko yang mungkin muncul dalam suatu sistem kerja di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Hasil Identifikasi risiko Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

a. Identifikasi risiko atas pelaksanaan kegiatan BPVP Kendari Tahun 2024

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari telah melakukan identifikasi risiko dengan melihat bisnis proses yang ada di satuan kerja BPVP Kendari yaitu penyelenggaraan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala BPVP Kendari dan kegiatan yang tertuang dalam DIPA dan POK BPVP

KENDARI tahun anggaran 2024 , yaitu :

- 1) Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
- 2) Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan
- 3) Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas
- 4) Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja
- 5) Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Binalavotas
- 6) Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Pelatihan
- 7) Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas
- 8) Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

Identifikasi risiko BPVP Kendari dilakukan terhadap 8 (delapan) kegiatan yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) uraian kegiatan. Dalam tahap ini pegawai BPVP Kendari sebanyak 20 (dua puluh) orang terdiri dari Pejabat Struktural Eselon IV, Subkoordinator, para pejabat fungsional dan staf pelaksana telah menginventarisasi risiko yang akan dikelola oleh BPVP Kendari dengan mengidentifikasi peristiwa atau kegiatan yang dapat mengancam tercapainya tujuan kegiatan yang ditetapkan.

Dari proses tersebut ditemukan 32 (tiga puluh dua) risiko yang ada dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan pelatihan Vokasi dan Produktivitas, terdapat 2 (dua) tahap proses (uraian kegiatan) dan ditemukan 2 (dua) risiko sebagaimana dalam tabel 2.5.;
- 2) Peningkatan Penyelenggaraan, Pelatihan Vokasi dan pemagangan, terdapat 4 (empat) tahap proses (uraian kegiatan) dan ditemukan 4 (empat) risiko sebagaimana dalam tabel 2.6.;
- 3) Pengembangan dan peningkatan Produktivitas, terdapat 3 (tiga) tahap proses (uraian kegiatan) dan ditemukan 3 (tiga) risiko

sebagaimana dalam tabel 2.7.;

- 4) Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja, terdapat 3 (tiga) tahap proses (uraian kegiatan) dan ditemukan 3 (tiga) risiko sebagaimana dalam tabel 2.8.;
- 5) Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Binalavotas, terdapat 3 (tiga) tahap proses (uraian kegiatan) dan ditemukan 3 (tiga) risiko sebagaimana dalam tabel 2.9.;
- 6) Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Pelatihan, terdapat 1 (satu) tahap proses (uraian kegiatan) dan ditemukan 2 (dua) risiko sebagaimana dalam tabel 2.10.;
- 7) Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas, terdapat 5 (lima) tahap proses (uraian kegiatan) dan ditemukan 8 (delapan) risiko sebagaimana dalam tabel 2.11.;
- 8) Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, terdapat 6 (enam) tahap proses (uraian kegiatan) dan ditemukan 7 (tujuh) risiko sebagaimana dalam tabel 2.12.;

Tabel 2.5. Identifikasi Risiko Kegiatan Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan pelatihan Vokasi dan Produktivitas;

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko	
No.	Tahapan Kegiatan	No.	Uraian Risiko
1.	Pembangunan dan/atau Renovasi Sarana Pendukung Pelatihan	1.	Waktu Pembangunan/ Renovasi tidak sesuai jadwal rencana
2.	Pembangunan dan/atau Renovasi Sarana Pendukung Pelatihan Pembangunan dan/atau Renovasi Sarana Pendukung Pelatihan	2.	Waktu Pembangunan miniatur tambang tidak sesuai jadwal rencana

Tabel 2.6. Identifikasi Risiko Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan, Pelatihan Vokasi dan pemagangan

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko	
No.	Tahapan Kegiatan	No.	Uraian Risiko
1.	Promosi Pelatihan Vokasi dan Pemagangan	1.	Promosi kurang sampai ke masyarakat luas dan industri

2.	Pemberdayaan Alumni Pelatihan Vokasi dan Pemagangan	2.	Tracing data alumni kurang lengkap
3.	Fasilitasi Pelayanan Kios Siap Kerja	3.	Jumlah masyarakat yang menggunakan layanan kios siapkerja sedikit
4.	Fasilitasi Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri (FKLPI)	4.	Rapat FKLPI masih belum bisa menunjukkan data pasar kerja yang akurat di wilayah Kalimantan Timur

Tabel 2.7. Pengembangan dan peningkatan Produktivitas

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko	
No.	Tahapan Kegiatan	No.	Uraian Risiko
1.	Bimbingan dan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	1.	Keterbatasan jumlah peserta yang dapat mengikuti bimbingan dan konsultasi produktivitas
2.	Pengukuran Peningkatan Produktivitas Perusahaan Oleh UPTP	2.	Keterbatasan personil yang dapat melakukan pengukuran peningkatan produktivitas di Perusahaan
3.	Pelatihan Peningkatan Produktivitas	3.	Jumlah peserta dan waktu pelaksanaan pelatihan tidak sesuai target

Tabel 2.8. Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko	
No.	Tahapan Kegiatan	No.	Uraian Risiko
1.	Kompetisi Keahlian / Keterampilan Tingkat Nasional Pelaksanaan Seleksi Daerah (SELEKDA ASC/WSC)	1.	Umur peserta lomba tidak dapat melanjutkan kompetisi di tingkat Asia/dunia
2.	Pengembangan Talenta Muda	2.	Narasumber yang kompeten untuk pelaksanaan kegiatan Telent Corner terbatas
3.	Penyusunan Program dan Modul PBK	3.	Penyusunan program dan modul tidak sesuai dengan rencana

Tabel 2.9 Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Binalavotas

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko	
No.	Tahapan Kegiatan	No.	Uraian Risiko
1.	SDM Bidang Sertifikasi yang dilatih	1.	Jumlah peserta kegiatan RCC Asesor Kompetensi tidak terpenuhi
2.	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja	2.	Tidak terpenuhinya Tempat Uji Kompetensi sesuai Standar
3.	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Berkeahlian Menengah Tinggi	3.	LSP P2 BPVP KENDARI belum memiliki skema sertifikasi

Tabel 2.10. Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Keahlian.

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko	
No.	Tahapan Kegiatan	No.	Uraian Risiko
1.	Pelatihan Peningkatan Karir Instruktur Pemerintah Kompetisi Keahlian / Keterampilan Regional	1.	Jumlah kompetitor pada masing-masing bidang lomba tidak terpenuhi sesuai target
		2.	Kesesuaian kondisi sarana prasarana lomba tidak sesuai MTP/ standar KKIN

Tabel 2.11. Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Keahlian

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko	
No.	Tahapan Kegiatan	No.	Uraian Risiko
1.	Pelaksanaan PBK di UPTP	1.	Beberapa program pelatihan PBK level operator dilaksanakan tidak sesuai dengan timeline yang ada
		2.	Jumlah lulusan pelatihan teknisi tidak sesuai target
		3.	Jumlah peserta pelatihan E-Training tidak sesuai target
2.	PBK BLK Komunitas	4.	Kesulitan mencari calon peserta di BLK Komunitas
3.	PBK di LPKS	5.	Administrasi di LPK berpotensi tidak sesuai dengan Juknis
4.	Pelatihan PFLK	6.	Tidak terpenuhinya target jumlah peserta PFLK
5.	PBK di UPTD Binaan (BLKK Kolaka, BLK Konawe Selatan, BLK Buton, BLK Konawe Utara, BLK Kolaka Utara)	7.	Keterlambatan penyelesaian laporan kegiatan PBK di UPTD
		8.	Pelaporan pertanggungjawaban (SP) terlambat dilaporkan

Tabel 2.12. Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

Bisnis Proses		Pernyataan Risiko	
No.	Tahapan Kegiatan	No.	Uraian Risiko
1.	Layanan Umum Implementasi 5S	1.	Implementasi 5S belum menyeluruh ke tiap bidang dan kejuruan
2.	Layanan Perkantoran	2.	Penyesuaian gelar dan alih jenjang kataegori pegawai terlambat
		3.	Pemeliharaan Gedung dan Peralatan pelatihan tidak sepenuhnya terpelihara
3.	Layanan Prasarana Internal	4.	Belanja modal peralatan dan mesin tidak semua bidang terpenuhi
4.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5.	Revisi anggaran terlambat diajukan
5.	Layanan Majemen Keuangan	6.	Kesalahan Pencatatan transaksi keuangan dan aset
6.	Layanan Reformasi Kinerja	7.	Pembuatan dan penggandaan laporan memerlukan waktu yang relatif panjang

13. Struktur Analisis Risiko

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan instansi pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi dengan rencana penilaian risiko. Strategi operasional diwujudkan untuk menentukan kriteria evaluasi yang akan dianalisis sesuai dengan struktur analisis. Struktur analisis risiko dan kriteria evaluasi risiko diharapkan akan menuntun para pihak yang terlibat dalam penilaian risiko mempunyai sudut pandang dan ukuran yang sama.

Sesuai sifat unit satuan kerja dan untuk kemudahan implementasi SPIP secara keseluruhan, struktur analisis risiko diterapkan untuk tindakan dan kegiatan dalam tiga konteks risiko yaitu *konteks strategis, konteks organisasional, dan konteks tingkat operasional*. Penyusunan desain penyelenggaraan SPIP dibuat dengan memperkirakan konsistensi penilaian risiko ini sekaligus dengan kegiatan pengendalian. Sumber risiko disusun untuk mendapatkan pemahaman tentang aspek-aspek risiko berasal yang dapat berupa 5 M diartikan sebagai Sumber Daya

Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, prosedur, pengguna, dan para pihak yang terkait.

Berdasarkan hasil identifikasi tujuan strategis dan identifikasi tujuan kegiatan BPVP Kendari, maka telah ditetapkan Struktur Analisis risiko BPVP Kendari sebagaimana dalam tabel 2.13.

(*man, money, machine, method, material*) yang dalam bahasa operasional

Tabel 2.13. Perumusan Struktur Analisis Risiko

Tujuan Perumusan	: Dimilikinya kerangka pikir (sebagai dasar mengidentifikasi dan menganalisis risiko) dengan merumuskan sumber risiko dan dampaknya, serta menganalisis pihak yang terkena dampak		
Nama Kegiatan	: 1. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 2. Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan 3. Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas 4. Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja 5. Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Binalavotas 6. Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Pelatihan 7. Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas 8. Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas		
No.	Sumber	Dampak	
		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4
1.	Keterbatasan SDM	Ketidakterseragaman proses pelaksanaan kegiatan	BPVP Kendari dan Masyarakat
2.	Standar Operasional Prosedur tidak ditaati	Pelaksanaan Kegiatan tidak optimal	BPVP Kendari dan Masyarakat
3.	Keterbatasan Alokasi Anggaran	Pelaksanaan Kegiatan tidak optimal	BPVP Kendari dan Masyarakat
4.	Sarana dan Prasarana tidak mendukung	Pelaksanaan Kegiatan tidak optimal	BPVP Kendari dan Masyarakat

5.	Koordinasi Lemah	SDM Tidak Kompeten	BPVP Kendari dan Masyarakat
----	------------------	--------------------	-----------------------------

Risiko yang sudah diidentifikasi harus dikategorikan untuk menentukan strategi operasional pelaksanaan penilaian risiko selanjutnya. Kriteria evaluasi risiko yaitu keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima dan/atau mengenai tingkat risiko yang dapat ditoleransi dan yang mana harus segera ditangani harus ditetapkan pada awal kegiatan penilaian risiko.

a. Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko menggunakan skala lima dan dibuat deskripsinya untuk menjamin konsistensi dalam analisis risiko. Jenjang dan deskripsi dampak diilustrasikan sebagai berikut :

Tabel 2.14. Tabel Skala Dampak Risiko

No.	Konsekuensi /Dampak	Kualitas Pelayanan
1.	Sangat kecil	Pada prinsipnya, defisiensi atau akibat tidak adanya pelayanan adalah sangat kecil
2.	Kecil	Defisiensi atau akibat tidak adanya pelayanan kecil, dan tanpa ada komentar
3.	Besar	Defisiensi atau akibat tidak adanya pelayanan adalah besar, dan dengan adanya beberapa komentar
4.	Sangat Besar	Defisiensi atau akibat tidak adanya pelayanan adalah sangat besar, dan dengan banyak sekali komentar

b. Skala Kemungkinan Terjadinya Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat atau kemungkinan terjadinya (probabilitas) risiko harus dipilih (skala empat) dan dibuatkan deskripsinya untuk menentukan konsistensi penilaian risiko. Skala dan deskripsi kemungkinan terjadinya risiko adalah sebagai berikut :

Tabel 2.15. Tabel Skala Kemungkinan Terjadinya Risiko

No.	Kemungkinan	Kejadian Berulang	Kejadian Tunggal	Skala Nilai
1.	Sangat Jarang	Kemungkinan terjadi > 25 tahun ke depan	Diabaikan : Probabilitas sangat kecil, mendekati nol	1
2.	Jarang	Kemungkinan terjadi > 25 tahun ke depan	Kecil Kemungkinan tetapi tidak diabaikan : Probabilitas rendah, tetapi lebih besar daripada nol	2
3.	Sering	Mungkin terjadi kira-kira sekali Dalam setahun	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50 / 50	3
4.	Sangat Sering	Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	Kemungkinan terjadi > 50%	4

14. Analisa Risiko

Analisis risiko dilakukan dengan cara menguraikan setiap risiko yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Analisis risiko mencakup analisa pemilik risiko, analisa penyebab risiko baik dari dalam maupun luar organisasi serta dampak dari risiko tersebut.

Kertas Kerja Penyusunan Daftar Risiko BPVP KENDARI Tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam lampiran 1. Analisa risiko digunakan untuk membuat peringkat risiko dari yang terendah sampai yang tertinggi serta sebagai data untuk evaluasi. Hal ini bisa menjadi acuan bagi organisasi untuk melihat tingkat prioritas risiko yang akan dihadapi maupun yang akan dikendalikan.

Risiko yang sudah diidentifikasi harus dikategorikan untuk menentukan strategi operasional pelaksanaan penilaian risiko selanjutnya. Kriteria evaluasi risiko yaitu keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima dan/atau mengenai tingkat risiko yang dapat ditoleransi dan yang mana harus segera ditangani harus ditetapkan pada awal kegiatan penilaian risiko.

Dari analisa risiko yang telah dilakukan untuk Kegiatan

Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Binalavotas; Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas; Pengembangan Standar Kompetensi dan Program Pelatihan Vokasi Binalavotas; Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Binalavotas; Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Keahlian Binalavotas; Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Binalavotas dilakukan dengan voting untuk menentukan skala kemungkinan dan skala dampak terhadap risiko yang telah diidentifikasi.

Kemungkinan risiko dapat dikategorikan dalam sangat jarang terjadi hingga hampir pasti terjadi sedangkan dampak risiko dapat dikategorikan dalam sangat rendah/tidak signifikan hingga sangat tinggi/katastropik.

Berikut adalah skala kemungkinan dan dampak terhadap 8 (delapan) kegiatan yang menjadi fokus penilaian risiko di BPVP Kendari (Tabel 2.16).

Tabel 2.16 Nilai skala kemungkinan dan dampak risiko

Skala	Nilai Skala Kemungkinan	Nilai Skala Dampak
1	Sangat Jarang	Sangat Kecil
2	Jarang	Kecil
3	Sering	Besar
4	Sangat Sering	Sangat Besar

Penentuan skala kemungkinan dan dampak dilakukan dengan cara Forum Group Discussion (FGD) Dalam tahap ini pegawai BPVP Kendari sebanyak 20 (dua puluh) orang terdiri Pejabat Eselon IV, Fungsional dan Staf Pelaksana telah melakukan survei persepsi tentang Tingkat/Level risiko di BPVP Kendari untuk mengetahui nilai masing-masing skala kemungkinan dan dampak risiko sehingga dapat diketahui peringkat risiko dari masing-masing kegiatan BPVP Kendari.

Hasil Forum Group Discussion (FGD) tersebut, diperoleh Peringat

risiko berdasarkan nilai rata-rata skala kemungkinan dan dampak masing-masing kegiatan di BPVP Kendari pada tabel 2.17 s.d. 2.24 sebagai berikut :

Tabel 2.17. Skala Kemungkinan dan Dampak Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Binalavotas

No.	Nama Risiko	Nilai Rata-Rata Kemungkinan	Nilai Rata-Rata Dampak	Total Skor	Peringkat
1.	Waktu Pembangunan/ Renovasi tidak sesuai jadwal rencana	2,50	2,55	5,05	10
2.	Waktu Pembangunan miniatur tambang tidak sesuai jadwal rencana	2,80	1,90	4,70	20

Tabel 2.18. Skala Kemungkinan dan Dampak Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan yang Berkualitas

No.	Nama Risiko	Nilai Rata-Rata Kemungkinan	Nilai Rata-Rata Dampak	Total Skor	Peringkat
1.	Promosi kurang sampai ke masyarakat luas dan industri	2,65	2,20	4,85	15
2.	Tracing data alumni kurang lengkap	2,75	2,75	5,50	3
3.	Jumlah masyarakat yang menggunakan layanan kios siapkerja sedikit	2,15	1,90	4,05	31
4.	Rapat FKLPI masih belum bisa menunjukkan data pasar kerja yang akurat di wilayah Kalimantan Timur	2,25	1,85	4,10	30

Tabel 2.19. Skala Kemungkinan dan Dampak Kegiatan Pelaksanaan Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas

No.	Nama Risiko	Nilai Rata-Rata Kemungkinan	Nilai Rata-Rata Dampak	Total Skor	Peringkat
1.	Keterbatasan jumlah peserta yang dapat mengikuti bimbingan dan konsultasi produktivitas	2,50	1,80	4,30	26
2.	Keterbatasan pernosil yang dapat melakukan pengukuran peningkatan produktivitas di Perusahaan	2,45	1,85	4,30	25
3.	Jumlah peserta dan waktu pelaksanaan pelatihan tidak sesuai target	2,40	1,75	4,15	29

Tabel 2.20. Skala Kemungkinan dan Dampak Kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Standarisasi Kompetensi kerja dan pelatihan Kerja

No.	Nama Risiko	Nilai Rata-Rata Kemungkinan	Nilai Rata-Rata Dampak	Total Skor	Peringkat
1.	Umur peserta lomba tidak dapat melanjutkan kompetisi di tingkat Asia/dunia	2,60	1,65	4,25	27
2.	Narasumber yang kompeten untuk pelaksanaan kegiatan Telent Corner terbatas	2,45	1,95	4,40	23
3.	Penyusunan program dan modul tidak sesuai dengan rencana	1,95	2,25	4,20	28

Tabel 2.21. Skala Kemungkinan dan Dampak Kegiatan Pelaksanaan Pengembangan sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Binalavotas

No.	Nama Risiko	Nilai Rata-Rata Kemungkinan	Nilai Rata-Rata Dampak	Total Skor	Peringkat
1.	Jumlah peserta kegiatan RCC Asesor Kompetensi tidak terpenuhi	1,95	2,85	4,80	17
2.	Tidak terpenuhinya Tempat Uji Kompetensi sesuai Standar	2,45	2,35	4,80	16
3.	LSP P2 BPVP KENDARI belum memiliki skema sertifikasi	3,05	2,50	5,55	2

Tabel 2.22. Skala Kemungkinan dan Dampak Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Pelatihan

No.	Nama Risiko	Nilai Rata-Rata Kemungkinan	Nilai Rata-Rata Dampak	Total Skor	Peringkat
1.	Jumlah kompetitor pada masing-masing bidang lomba tidak terpenuhi sesuai target	2,85	2,30	5,15	7
2.	Kesesuaian kondisi sarana prasarana lomba tidak sesuai MTP/ standar KKIN	2,80	2,60	5,40	4

Tabel 2.23. Skala Kemungkinan dan Dampak Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas

No.	Nama Risiko	Nilai Rata-Rata Kemungkinan	Nilai Rata-Rata Dampak	Total Skor	Peringkat
1.	Beberapa program pelatihan PBK level operator dilaksanakan tidak sesuai dengan timeline yang ada	2,85	2,25	5,10	8
2.	Jumlah lulusan pelatihan teknisi tidak sesuai target	2,80	1,85	4,65	21
3.	Jumlah peserta pelatihan E-Training tidak sesuai target	2,50	1,85	4,35	24
4.	Kesulitan mencari calon peserta di BLK Komunitas	2,05	2,90	4,95	13
5.	Administrasi di LPK berpotensi tidak sesuai dengan Juknis	2,00	2,75	4,75	18
6.	Tidak terpenuhinya target jumlah peserta PFLK	2,95	2,80	5,75	1
7.	Keterlambatan penyelesaian laporan kegiatan PBK di UPTD	2,65	1,90	4,55	22
8.	Pelaporan pertanggungjawaban (SPJ) terlambat dilaporkan	2,70	2,35	5,05	9

Tabel 2.24. Skala Kemungkinan dan Dampak Kegiatan Pelaksanaan Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

No.	Nama Risiko	Nilai Rata-Rata Kemungkinan	Nilai Rata-Rata Dampak	Total Skor	Peringkat
1.	Implementasi 5S belum menyeluruh ke tiap bidang dan kejuruan	2,25	2,70	4,95	12
2.	Penyesuaian gelar dan alih jenjang kataegori pegawai terlambat	2,50	2,80	5,30	5
3.	Pemeliharaan Gedung dan Peralatan pelatihan tidak sepenuhnya terpelihara	2,90	2,30	5,20	6
4.	Pemeliharaan Gedung dan Peralatan pelatihan tidak sepenuhnya terpelihara	2,90	2,30	5,20	14
5.	Belanja modal peralatan dan mesin tidak semua bidang terpenuhi	2,60	2,30	4,90	11
6.	Revisi anggaran terlambat diajukan	2,60	2,40	5,00	19
7.	Kesalahan Pencatatan transaksi keuangan dan aset	2,35	2,35	4,70	32

Dari skala kemungkinan dan dampak yang telah didapat diatas, kemudian dibuat rata-rata dari masing-masing skala kemungkinan dan dampak. Hasil perkalian rata-rata nilai skala kemungkinan dan dampak adalah total skor sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 2.25.

Tabel 2.25. Kategori Level Risiko

Kategori Level	Skor	Tindakan yang diambil
Sangat Rendah	≤ 3.99	Tidak diperlukan tindakan
Rendah	$4 \leq 7.99$	Diambil tindakan jika diperlukan dan apabila tersedia sumber daya
Tinggi	$8 \leq 11.99$	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko
Sangat Tinggi	$12 \leq 16$	Diperlukan tindakan segera utk mengelola Risiko

Keterangan: x: Score / total skor / perkalian rata-rata nilai skala kemungkinan dan dampak.

Tabel 2.25 di atas menunjukkan kategori level dari tingkat risiko dan jenis tindakan yang akan diambil berdasarkan nilai skor yang didapat pada total skor di atas. Dari hasil analisis risiko dengan skala kemungkinan dan dampak pada kegiatan BPVP Kendari dari terhadap 8 (delapan) kegiatan yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) uraian kegiatan, telah diidentifikasi sebanyak 32 (tiga puluh dua) risiko dengan rincian sebanyak 31 (tiga puluh satu) risiko dengan kategori rendah, 1 (satu) risiko dengan kategori sangat rendah. Tingkat risiko BPVP Kendari sebagaimana terlihat dalam tabel 2.26 s.d 2.33 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.26. Kategori dan Tingkat Risiko Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Binalavotas

No.	Nama Risiko	Nilai Rata-Rata Kemungkinan	Nilai Rata-Rata Dampak	Total Skor	Tingkat Resiko
1.	Waktu Pembangunan/ Renovasi tidak sesuai jadwal rencana	2,50	2,55	5,05	RENDAH
2.	Waktu Pembangunan miniatur tambang tidak sesuai jadwal rencana	2,80	1,90	4,70	RENDAH

Pada tabel 2.26 dari hasil analisa risiko dengan skala kemungkinan dan dampak Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Binalavotas didapatkan 2 (dua) risiko dengan kataegori RENDAH (diambil tindakan jika diperlukan dan apabila tersedia sumber daya).

Tabel 2.27. Kategori dan Tingkat Risiko Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan yang Berkualitas

No.	Nama Risiko	Nilai Rata-Rata Kemungkinan	Nilai Rata-Rata Dampak	Total Skor	Tingkat Resiko
1.	Promosi kurang sampai ke masyarakat luas dan industri	2,65	2,20	4,85	RENDAH
2.	Tracing data alumni kurang lengkap	2,75	2,75	5,50	RENDAH
3.	Jumlah masyarakat yang menggunakan layanan kios siapkerja sedikit	2,15	1,90	4,05	RENDAH
4.	Rapat FKLPI masih belum bisa menunjukkan data pasar kerja yang akurat di wilayah beberapa Kabupaten	2,25	1,85	4,10	RENDAH

Pada tabel 2.27 dari hasil analisa risiko dengan skala kemungkinan dan dampak Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan yang Berkualitas didapatkan 4 (empat) risiko dengan kataegori RENDAH (diambil tindakan jika diperlukan dan apabila tersedia sumber daya).

Tabel 2.28. Kategori dan Tingkat Risiko Kegiatan Pelaksanaan Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas

No.	Nama Risiko	Nilai Rata-Rata Kemungkinan	Nilai Rata-Rata Dampak	Total Skor	Tingkat Resiko
1.	Keterbatasan jumlah peserta yang dapat mengikuti bimbingan dan konsultasi Produktivitas	2,50	1,80	4,30	RENDAH
2.	Keterbatasan pernosil yang dapat melakukan pengukuran peningkatan produktivitas di Perusahaan	2,45	1,85	4,30	RENDAH
3.	Jumlah peserta dan waktu pelaksanaan pelatihan tidak sesuai target	2,40	1,75	4,15	RENDAH

Pada tabel 2.28 dari hasil analisa risiko dengan skala kemungkinan dan dampak Kegiatan Pelaksanaan Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas didapatkan 3 (tiga) risiko dengan kataegori RENDAH (diambil tindakan jika diperlukan dan apabila tersedia sumber daya).

Tabel 2.29. Skala Kemungkinan dan Dampak Kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Standarisasi Kompetensi kerja dan pelatihan Kerja

No.	Nama Risiko	Nilai Rata-Rata Kemungkinan	Nilai Rata-Rata Dampak	Total Skor	Tingkat Resiko
1.	Umur peserta lomba tidak dapat melanjutkan kompetisi di tingkat Asia/dunia	2,60	1,65	4,25	RENDAH
2.	Narasumber yang kompeten untuk pelaksanaan kegiatan Telent Corner terbatas	2,45	1,95	4,40	RENDAH
3.	Penyusunan program dan modul tidak sesuai dengan rencana	1,95	2,25	4,20	RENDAH

Pada tabel 2.29 dari hasil analisa risiko dengan skala kemungkinan dan dampak Kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Standarisasi Kompetensi kerja dan pelatihan Kerja didapatkan 3 (tiga) risiko dengan kataegori RENDAH (diambil tindakan jika diperlukan dan apabila tersedia sumber daya).

Tabel 2.30. Skala Kemungkinan dan Dampak Kegiatan Pelaksanaan Pengembangan sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Binalavotas

No.	Nama Risiko	Nilai Rata-Rata Kemungkinan	Nilai Rata-Rata Dampak	Total Skor	Tingkat Resiko
1.	Jumlah peserta kegiatan RCC Asesor Kompetensi tidak terpenuhi	1,95	2,85	4,80	RENDAH
2.	Tidak terpenuhinya Tempat Uji Kompetensi sesuai Standar	2,45	2,35	4,80	RENDAH

3.	LSP P2 BPVP Kendari belum memiliki skema sertifikasi	3,05	2,50	5,55	RENDAH
----	--	------	------	------	--------

Pada tabel 2.30 dari hasil analisa risiko dengan skala kemungkinan dan dampak Kegiatan Pelaksanaan Pengembangan sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Binalavotas didapatkan 3 (tiga) risiko dengan kataegori RENDAH (diambil tindakan jika diperlukan dan apabila tersedia sumber daya).

Tabel 2.31. Skala Kemungkinan dan Dampak Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Pelatihan

No.	Nama Risiko	Nilai Rata-Rata Kemungkinan	Nilai Rata-Rata Dampak	Total Skor	Tingkat Resiko
1.	Jumlah kompetitor pada masing-masing bidang lomba tidak terpenuhi sesuai target	2,85	2,30	5,15	RENDAH
2.	Kesesuaian kondisi sarana prasarana lomba tidak sesuai MTP/ standar KKIN	2,80	2,60	5,40	RENDAH

Pada tabel 2.31 dari hasil analisa risiko dengan skala kemungkinan dan dampak Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Pelatihan didapatkan 2 (dua) risiko dengan kataegori RENDAH (diambil tindakan jika diperlukan dan apabila tersedia sumber daya).

Tabel 2.32. Skala Kemungkinan dan Dampak Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas

No.	Nama Risiko	Nilai Rata-Rata Kemungkinan	Nilai Rata-Rata Dampak	Total Skor	Tingkat Resiko
1.	Beberapa program pelatihan PBK level operator dilaksanakan tidak sesuai dengan timeline yang ada	2,85	2,25	5,10	RENDAH

2.	Jumlah lulusan pelatihan teknisi tidak sesuai target	2,80	1,85	4,65	RENDAH
3.	Jumlah peserta pelatihan E-Training tidak sesuai target	2,50	1,85	4,35	RENDAH
4.	Kesulitan mencari calon peserta di BLK Komunitas	2,05	2,90	4,95	RENDAH
5.	Administrasi di LPK berpotensi tidak sesuai dengan Juknis	2,00	2,75	4,75	RENDAH
6.	Tidak terpenuhinya target jumlah peserta PFLK	2,95	2,80	5,75	RENDAH
7.	Keterlambatan penyelesaian laporan kegiatan PBK di UPTD	2,65	1,90	4,55	RENDAH
8.	Pelaporan pertanggungjawaban (SPJ) terlambat dilaporkan	2,70	2,35	5,05	RENDAH

Pada tabel 2.32 dari hasil analisa risiko dengan skala kemungkinan dan dampak Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas didapatkan 8 (delapan) risiko dengan kataegori RENDAH (diambil tindakan jika diperlukan dan apabila tersedia sumber daya).

Tabel 2.33. Skala Kemungkinan dan Dampak Kegiatan Pelaksanaan Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

No.	Nama Risiko	Nilai Rata-Rata Kemungkinan	Nilai Rata-Rata Dampak	Total Skor	Tingkat Risiko
1.	Implementasi 5S belum memyeluruh ke tiap bidang dan kejuruan	2,25	2,70	4,95	RENDAH
2.	Penyesuaian gelar dan alih jenjang kataegori pegawai terlambat	2,50	2,80	5,30	RENDAH
3.	Pemeliharaan Gedung dan Peralatan pelatihan tidak sepenuhnya terpelihara	2,90	2,30	5,20	RENDAH
4.	Belanja modal peralatan dan mesin tidak semua bidang Terpenuhi	2,60	2,30	4,90	RENDAH

5.	Revisi anggaran terlambat diajukan	2,60	2,40	5,00	RENDAH
6.	Kesalahan Pencatatan transaksi keuangan dan aset	2,35	2,35	4,70	RENDAH
7.	Pembuatan dan penggandaan laporan memerlukan waktu yang relatif panjang	2,05	1,90	3,95	SANGAT RENDAH

Pada tabel 2.33 dari hasil analisa risiko dengan skala kemungkinan dan dampak Kegiatan Pelaksanaan Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas didapatkan 6 (enam) risiko dengan kataegori RENDAH (diambil tindakan jika diperlukan dan apabila tersedia sumber daya) dan didapatkan 1 (satu) risiko dengan kataegori SANGAT RENDAH (tidak diperlukan tindakan).

15. Matrik Risiko/ Skala Risiko/ Peta Risiko

Matriks risiko atau skala risiko berfungsi sebagai dasar atau template untuk penyusunan peta risiko sekaligus sebagai sarana untuk membuat kesepakatan atas area risiko yang dapat diterima (*acceptable*) atau area tidak dapat diterima (*unacceptable*).

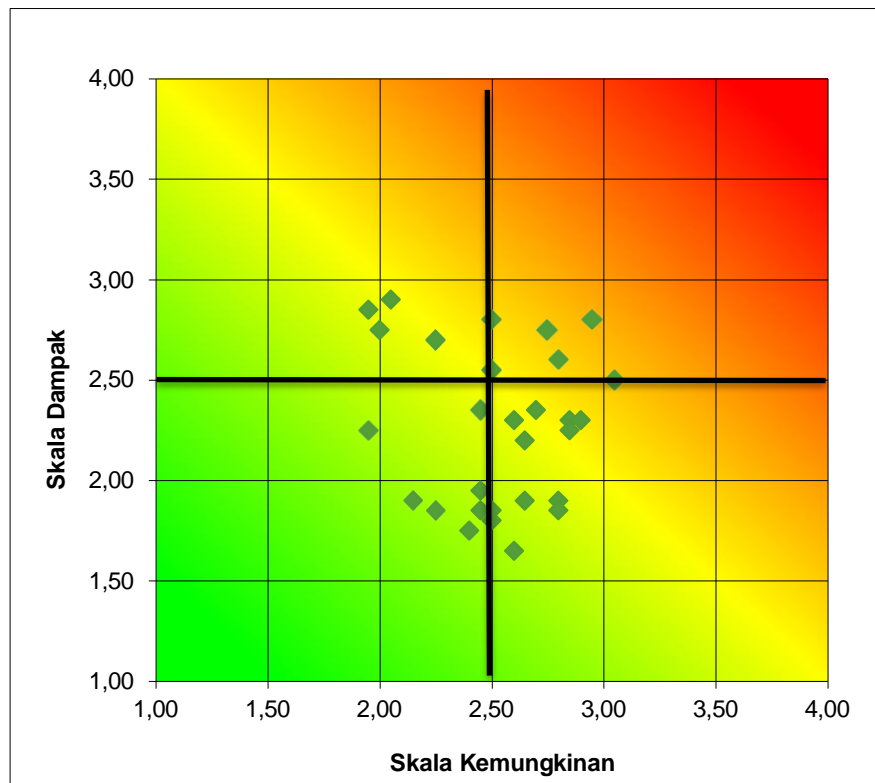
Matriks risiko dibuat sesuai dengan skala dampak dan skala konsekuensi yang diukur sebelumnya. Matriks yang dibuat berukuran 4x4. Penyusunan skala risiko dalam matriks tersebut akan menentukan sifat tindakan atau strategi penanganan risiko dalam unsur SPIP berikutnya kegiatan pengendalian.

Dalam skala empat, matriks peta risiko terdiri dari 16 (enam belas) bidang. Bidang-bidang dengan spesifikasi warna tersebut menjadi dasar menetapkan risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hasil Penilaian risiko BPVP KENDARI Tahun 2023, maka Matrik risiko dan Peta Risiko BPVP KENDARI ditunjukkan di dalam gambar 2.2 dan 2.3.



Gambar 2. 2. Matrik Risiko Kegiatan BPVP KENDARI Tahun 2024



Gambar 2. 3. Peta Risiko Kegiatan BPVP KENDARI Tahun 2024

16. Prioritas Risiko

Pimpinan instansi pemerintah menetapkan area yang menjadi prioritas perhatian sesuai dengan selera risikonya atau preferensinya. Dalam matriks di atas, area sangat tinggi menunjukkan area yang mempunyai sisa risiko yang sangat tinggi yang berarti membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi (risiko tidak dapat diterima). Selanjutnya, untuk area tinggi dan sedang menjadi prioritas penanganan berikutnya (risiko tidak dapat diterima), pada area rendah berarti dapat ditoleransi (risiko dapat diterima).

Berdasarkan pemeringkatan risiko untuk 32 (tiga puluh dua) kegiatan BPVP Kendari diidentifikasi sejumlah peristiwa/kegiatan yang dapat mengancam tercapainya tujuan yang diinginkan. Prioritas pengendalian risiko ditentukan berdasarkan tingkat atau kategori risiko. Peristiwa atau kegiatan yang berisiko sangat rendah sampai sedang, dapat dikendalikan secara internal. Peristiwa atau kegiatan yang berisiko tinggi dan sangat tinggi, terutama yang berkaitan dengan pihak lain, akan dilakukan tindakan pengendalian spesifik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Dalam hal tertentu yang melibatkan pihak lain, risiko tinggi dan sangat tinggi akan dikendalikan di tingkat pimpinan. Prioritas risiko yang telah ditetapkan untuk menjadi fokus perbaikan pada kegiatan BPVP adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) risiko dengan rincian sebanyak 31 (tiga puluh satu) risiko dengan kategori rendah, 1 (satu) risikodengan kategori sangat rendah.

BAB III

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan. Setelah risiko diidentifikasi dalam register risiko, maka perlu diidentifikasi pula pengendalian yang telah ada serta pengendalian yang perlu dirancang dalam rangka mengelola risiko sesuai *Risk Appetite* pemilik risiko. Identifikasi pengendalian yang sudah ada dimaksudkan untuk menilai apakah pengendalian tersebut sudah efektif atau belum untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi. Jika tidak efektif atau kurang efektif, maka perlu dibangun/dirancang pengendalian yang baru. Alat/ sarana pengendalian berupa kebijakan-kebijakan dan prosedur- prosedur yang diharapkan dapat meminimalkan terjadinya risiko sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Langkah-langkah dalam merancang kegiatan pengendalian sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penilaian risiko, pemilik risiko mengidentifikasi apakah kegiatan pengendalian yang ada telah efektif untuk meminimalisir risiko;
2. Kegiatan pengendalian yang telah ada tersebut perlu dinilai efektivitasnya dalam rangka mengurangi probabilitas terjadinya risiko (abatisasi) maupun mengurangi dampak risiko (mitigasi);
3. Selain itu, juga perlu diperhatikan ada/tidaknya pengendalian alternatif (*compensating control*) yang dapat mengurangi terjadinya risiko;
4. Terhadap risiko yang belum ada kegiatannya maupun yang telah ada namun dinilai kurang atau tidak efektif, perlu dirancang kegiatan pengendalian yang baru/merevisi kegiatan pengendalian yang sudah ada;
5. Menerapkan kegiatan pengendalian yang telah dirancang dalam mengelola risiko;
6. Dalam merancang kegiatan pengendalian, pemilik risiko memperhatikan peraturan yang berlaku.

Kegiatan pengendalian terhadap risiko yang teridentifikasi di BPVP

Kendari berisi kegiatan pengendalian yang sudah berjalan dan akan dibangun. Terdapat sejumlah kegiatan pengendalian yang efektif dan kurang efektif dalam mengendalikan risiko yang telah teridentifikasi. Kegiatan pengendalian yang telah efektif akan dipertahankan, sedangkan kegiatan pengendalian yang belum efektif akan ditingkatkan menjadi efektif melalui kegiatan pengendalian yang akan dibangun dan ditetapkan target waktunya. Adapun desain Rencana Kegiatan Pengendalian BPVP Kendari sebagai mana dalam tabel 3.1 s.d. 3.8 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1. Desain Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Binalavotas.

Satuan Kerja	BPVP Kendari
Kegiatan	Pelaksanaan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Binalavotas
Tujuan Kegiatan	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Binalavotas

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Pengendalian yang Sudah Ada	Efektif/ Kurang Efektif	Pengendalian yang harus ada	Waktu Pelaksanaan
1.	Waktu Pembangunan/ Renovasi tidak sesuai jadwal rencana	Finalisasi dokumen tender terlambat Delegasi tugas panitia pengadaan barang dan jasa	Kepala memantau progres pembangunan/renovasi setiap minggu	Efektif	Koordinasi dengan biro umum	Sepanjang tahun anggaran
2.	Waktu Pembangunan miniatur tambang tidak sesuai jadwal rencana	Finalisasi dokumen tender terlambat Delegasi tugas panitia pengadaan barang dan jasa	Kepala memantau progres pembangunan setiap minggu	Cukup Efektif	Koordinasi dengan biro umum	Sepanjang tahun anggaran

Tabel 3.2. Desain Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan yang Berkualitas.

Satuan Kerja	BPVP Kendari
Kegiatan	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Binalavotas
Tujuan Kegiatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan yang Berkualitas

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Pengendalian yang Sudah Ada	Efektif/ Kurang Efektif	Pengendalian yang harus ada	Waktu Pelaksanaan
1.	Promosi kurang sampai ke masyarakat luas dan industri	Belum terlaksana promosi secara langsung di sekolah ataupun kelurahan Tidak semua masyarakat memiliki media sosial di Handphone	Melakukan Promosi Di media Sosial	Cukup Efektif	Pembuatan banner dan video promosi di media sosial	Sepanjang tahun anggaran
2.	Tracing data alumni kurang lengkap	Kesediaan alumni untuk mengisi link survey kebekerjaan alumni	Penyebaran Link Survey	Cukup Efektif	Sosialisasi dan penekanan informasi pentingnya pengisian link survey kepada peserta pelatihan saat apel pagi	Sepanjang tahun anggaran
3.	Jumlah masyarakat yang menggunakan layanan kios siapkerja sedikit	Masyarakat belum memahami fungsi Kios SiapKerja	Sosialisai Ke Security sebagai garda terdepan pelayanan	Cukup Efektif	Memberi arahan kepada security untuk mengarahkan dan menunjukkan kios siap kerja	Sepanjang tahun anggaran
4.	Rapat FKLPI masih belum bisa menunjukkan data pasar kerja yang akurat di wilayah Beberapa Kabupaten	Belum di ketahui kualifikasi kebutuhan tenaga kerja di DU/DI	Rapat dan Evaluasi Kerja FKLPI	Efektif	Berdiskusi dan pemetaan kebutuhan pelatihan dengan DU/DI	Sepanjang tahun anggaran

Tabel 3.3. Desain Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas.

Satuan Kerja	BPVP Kendari
Kegiatan	Pelaksanaan Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas
Tujuan Kegiatan	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Pengendalian yang Sudah Ada	Efektif/ Kurang Efektif	Pengendalian yang harus ada	Waktu Pelaksanaan
1.	Keterbatasan jumlah peserta yang dapat mengikuti bimbingan dan konsultasi produktivitas	Kurangnya pemahaman UMKM dan DU/DI terkait peningkatan produktivitas	Rapat Koordinasi	Efektif	Membuat matrik pelaksanaan pengukuran peningkatan produktivitas	Sepanjang tahun anggaran
2.	Keterbatasan personil yang dapat melakukan pengukuran peningkatan produktivitas di Perusahaan	Personil sebagian besar instruktur yang sedang menjalankan tugas mengajar siswa pelatihan yang masih berjalan. Kesediaan waktu dan tempat perusahaan yang akan Diukur	Pelatihan Instruktur Produktivitas untuk Pegawai BPVP	Cukup Efektif	Membuat matrik pelaksanaan pengukuran peningkatan produktivitas	Sepanjang tahun anggaran
3.	Jumlah peserta dan waktu pelaksanaan pelatihan tidak sesuai target	Minat masyarakat mengikuti pelatihan	Rapat Internal	Efektif	Memberikan informasi menggunakan surat atau selebaran via media sosial	Sepanjang tahun anggaran

Tabel 3.4. Desain Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Pengembangan Standarisasi Kompetensi kerja dan pelatihan Kerja

Satuan Kerja	BPVP Kendari
Kegiatan	Pelaksanaan Pengembangan Standarisasi Kompetensi kerja dan pelatihan Kerja
Tujuan Kegiatan	Terlaksananya Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja yang berkualitas

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Pengendalian yang Sudah Ada	Efektif/ Kurang Efektif	Pengendalian yang harus ada	Waktu Pelaksanaan
1.	Umur peserta lomba tidak dapat melanjutkan kompetisi di tingkat Asia/dunia	SDM tim rekrut kurang teliti dalam pemeriksaan berkas pendaftaran Pemahaman calon kompetitor terhadap kelanjutan tingkatan lomba (daerah, nasional, asean dan dunia)	Rapat Koodinasi dengan Pusat	Efektif	Penambahan SDM dalam proses seleksi tingkat daerah	Per minggu, Per kegiatan
2.	Narasumber yang kompeten untuk pelaksanaan kegiatan Telent Corner terbatas	Keterbatasan jumlah pegawai yang mempunyai kompetensi khusus Minat masyarakat di bidang kompetensi Tertentu	Koordinasi dengan Komunitas atau Asosiasi	Efektif	Mencari rekomendasi instruktur yang kompeten dari asosiasi/komunitas	Per kegiatan
3.	Penyusunan program dan modul tidak sesuai dengan rencana	Jumlah tim dan waktu penyusunan yang terbatas Persetujuan proposal dan ujicoba yang memerlukan Waktu	Study Banding	Efektif	Evaluasi dan perbaikan dari hasil percobaan pembuatan inovasi	Per kegiatan

Tabel 3.5. Desain Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Pengembangan sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Binalavotas

Satuan Kerja	BPVP Kendari
Kegiatan	Pelaksanaan Pengembangan sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Binalavotas
Tujuan Kegiatan	Terlaksanannya Sertifikasi Kompetensi Kerja

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Pengendalian yang Sudah Ada	Efektif/ Kurang Efektif	Pengendalian yang harus ada	Waktu Pelaksanaan
1.	Jumlah peserta kegiatan RCC Asesor Kompetensi tidak terpenuhi	Terdapat peserta yang mengundurkan diri	pemilahan data peserta RCC	Efektif	Mencari peserta pengganti dari data asesor di LSP	Per kegiatan

2.	Tidak terpenuhinya Tempat Uji Kompetensi sesuai Standar	Terdapat kelalaian pada saat proses verifikasi Kelayakan tempat dan peralatan di UPTD	Monitoring evaluasi TUK UJK	Cukup Efektif	Memundurkan jadwal UJK agar TUK mempunyai waktu melengkapai peralatan	Sepanjang tahun anggaran
3.	LSP P2 BPVP KENDARI belum memiliki skema sertifikasi	Belum dibuatnya skema sertifikasi Mekanik Alat Berat Belum adanya SKKNI yang menaungi bidang mekanik alat Berat	Koordinasi dengan LSP P3	Cukup Efektif	Mengajukan surat permohonan UJK dengan LSP P3	Sepanjang tahun anggaran

Tabel 3.6. Desain Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Pelatihan ivitas

Satuan Kerja	BPVP Kendari
Kegiatan	Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Pelatihan
Tujuan Kegiatan	Meningkatnya Kompetensi Instruktur dan Tenaga Pelatihan

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Pengendalian yang Sudah Ada	Efektif / Kurang Efektif	Pengendalian yang harus ada	Waktu Pelaksanaan
1.	Jumlah kompetitor pada masing-masing bidang lomba tidak terpenuhi sesuai target	Kurangnya promosi dan penyebarluasan informasi kepada calon kompetitor Kualifikasi calon kompetitor tidak sesuai dengan persyaratan	Pengumuman pendaftaran di media sosial	Efektif	Pengontrolan jumlah pendaftar kompetisi secara intens	per kegiatan
2.	Kesesuaian kondisi sarana prasarana lomba tidak sesuai MTP/standar KKIN	Revitalisasi sarana prasarana belum sesuai dengan standar	Inventarisir sarana dan prasarana yang layak dan tidak layak	Efektif	Melakukan Revitalisasi sarana dan prasarana di tiap bidang lomba sesuai standar	seminggu sekali, per kegiatan

Tabel 3.6. Desain Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas

Satuan Kerja	BPVP KENDARI
Kegiatan	Pelaksanaan Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas
Tujuan Kegiatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Pengendalian yang Sudah Ada	Efektif/Kurang Efektif	Pengendalian yang harus ada	Waktu Pelaksanaan
1.	Beberapa program pelatihan PBK level operator dilaksanakan tidak sesuai dengan timeline yang ada	Penyesuaian dengan jumlah dan minat pendaftar Minat masyarakat yang mendaftar pada program tertentu saja	perubahan matrik agenda pembukaan pelatihan	Cukup Efektif	Terus promosi terkait program pelatihan di BPVP Kendari	Sepanjang tahun anggaran
2.	Jumlah lulusan pelatihan teknisi tidak sesuai target	Berjalannya program teknisi yang baru Siswa teknisi mengundurkan diri	nominatif siswa dan jadwal pelaksanaan pelatihan teknisi	Cukup Efektif	Pembuatan susrat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pelatihan	Sepanjang tahun anggaran
3.	Jumlah peserta pelatihan E-Training tidak sesuai target	Berkurangnya jumlah peserta antara offline dan online	Pembuatan timeline kegiatan pelatihan e-training	Cukup Efektif	pemberihan pemahaman dan surat pernyataan kesanggupan mengikuti pelatihan sampai selesai	Per kegiatan
4.	Kesulitan mencari calon peserta di BLK Komunitas	Kurangnya koordinasi Letak BLK Komunitas yang jauh	koordinasi dengan PIC BLK Komunitas	Efektif	penundaan pencairan dana bilamana belum didapat jumlah peserta yang sesuai	Sepanjang tahun anggaran
5.	Administrasi di LPK berpotensi tidak sesuai dengan Juknis	Pemberian informasi yang kurang lengkap Stakeholder tidak segera untuk bisa memenuhi kekurangan administrasi	Pemberian informasi dokumen pelaksanaan pelatihan	Efektif	Koordinasi secara intensif dengan pengelola LPK	Sepanjang tahun anggaran
6.	Tidak terpenuhinya target jumlah peserta PFLK	Stakeholder hanya minat di program pelatihan tertentu	penjajakan kerjasama dengan stageholder terkait	Efektif	Pembuatan RAB yang sesuai peraturan sehingga stageholder bisa melakukan kegiatan PFLK di BPVP	Sepanjang tahun anggaran

7,	Keterlambatan penyelesaian laporan kegiatan PBK di UPTD	Kurangnya pengawasan terhadap proses perencanaan kegiatan Keterbatasan SDM yang kompeten	Rapat koordinasi bersama pengelola BLK UPTD	Cukup Efektif	Koordinasi dengan PIC kegiatan di UPTD	Sepanjang tahun anggaran
8,	Pelaporan pertanggungjawaban (SPJ) terlambat dilaporkan	SDM PIC Pelaksana UPTD kurang melakukan penekanan target pengumpulan SPJ UPTD lambat dalam pembuatan SPJ	Rapat koordinasi bersama pengelola BLK UPTD	Efektif	Koordinasi dan terus mengingatkan terkait pembuatan dan pengumpulan SPJ	Sepanjang tahun anggaran

Tabel 3.6. Desain Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

Satuan Kerja	BPVP KENDARI
Kegiatan	Pelaksanaan Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
Tujuan Kegiatan	Terlaksananya Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Pengendalian yang Sudah Ada	Efektif/ Kurang Efektif	Pengendalian yang harus ada	Waktu Pelaksanaan
1.	Implementasi 5S belum menyeluruh ke tiap bidang dan kejuruan	Belum ada masukan dan usulan kegiatan dari bidang/kejuruan sesuai dengan kebutuhan	koordinasi dengan tim 5S untuk pelaksanaan kegiatan implementasi 5S	Efektif	Melakukan komunikasi dan menerima masukan/usulan dari tiap bidang/kejuruan	Sepanjang tahun anggaran
2.	Penyesuaian gelar dan alih jenjang kategori pegawai terlambat	Menunggu pedoman dan peraturan terbit	Koordinasi ke kepegawaian Setditjen Binalavotas	Efektif	menginformasikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk kelengkapan dokumen	Sepanjang tahun anggaran
3.	Pemeliharaan Gedung dan Peralatan pelatihan tidak sepenuhnya terpelihara	Kerusakan terjadi secara bergantian di tiap bidang ataupun kejuruan	menerima laporan kerusakan dan inventarisir prioritas pemeliharaan	Cukup Efektif	koordinasi dan penentuan skala prioritas kerusakan yang akan dipelihara/diperbaiki	Sepanjang tahun anggaran
4.	Belanja modal peralatan dan mesin	Pembelian berdasarkan skala prioritas	mendata usulan belanja modal dari tiap bidang	Efektif	menyesuaikan anggaran dengan prioritas yang	Sepanjang tahun anggaran

	tidak semua bidang terpenuhi	permohonan			akan dibelanjakan	
5.	Revisi anggaran terlambat diajukan	Penyisiran anggaran ada yang terlewat Batas waktu sudah ditentukan	pemantauan kegiatan dan realisasi anggaran	Efektif	Rapat manajemen setiap bulan dan triwulan	Sepanjang tahun anggaran
6.	Kesalahan Pencatatan transaksi keuangan dan aset	keterbatasan personil SDM yang mencatat	inventarisir pencatatan aset dari tahun berjalan	Cukup Efektif	penambahan SDM untuk membantu pencatatan keuangan dan aset	Sepanjang tahun anggaran
7,	Pembuatan dan penggandaan laporan memerlukan waktu yang relatif panjang	pembuatan dokumen dengan personil yang terbatas Pihak percetakan memerlukan waktu yang sedikit lama	membuat target penggandaan laporan	Cukup Efektif	koordinasi dengan pihak percetakan dokumen	Sepanjang tahun anggaran

Kertas Kerja Evaluasi Rencana tindakan pengendalian untuk kegiatan BPVP KENDARI dirangkum dalam kertas kerja yang ditunjukkan pada Lampiran 3.

BAB IV

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pasal 3 Ayat (1) Huruf d menjelaskan bahwa Yang dimaksud dengan “informasi” adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, sedangkan Yang dimaksud dengan “komunikasi” adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

Unsur pengendalian intern keempat adalah informasi dan komunikasi. Unit kerja dan satuan kerja harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun nonkeuangan yang berhubungan dengan peristiwa eksternal dan internal. Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan dan pengguna lainnya di seluruh unit kerja dan satuan kerja yang bersangkutan dalam bentuk dan kerangka waktu yang tepat sehingga yang bersangkutan dapat melaksanakan pengendalian intern dan tanggung jawab operasional.

Unit kerja dan satuan kerja diwajibkan untuk menyiapkan, menyusun prosedur, menyampaikan informasi kinerja (operasional dan keuangan) secara tertulis, periodik, dan melembaga sebagai perwujudan normatif pertanggungjawaban dari unit kerja dan satuan kerja (menjelaskan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja).

Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan unit kerja dan satuan kerja harus menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus-menerus. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Manajemen sistem informasi dilaksanakan berdasarkan suatu rencana strategis sistem informasi yang merupakan bagian dari rencana strategis unit kerja dan satuan kerja secara keseluruhan;
2. Adanya mekanisme untuk mengidentifikasi berkembangnya kebutuhan informasi;
3. Sebagai bagian dari manajemen informasi, unit kerja dan satuan kerja

telah memantau, menganalisis, mengevaluasi, dan memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi untuk dapat memberikan pelayanan lebih cepat dan efisien;

4. Pimpinan unit kerja dan satuan kerja secara terus menerus memantau mutu informasi yang dikelola, diukur dari segi kelayakan isi, ketepatan waktu, keakuratan, dan kemudahan aksesnya;
5. Dukungan pimpinan unit kerja dan satuan kerja terhadap pengembangan;
6. Teknologi Informasi (TI) ditunjukkan dengan komitmennya dalam menyediakan pegawai dan pendanaan yang memadai terhadap upaya pengembangan TI.

Setiap rencana tindak pengendalian baik yang sudah berjalan maupun yang akan dibangun memerlukan informasi dan komunikasi sesuai dengan risiko yang telah teridentifikasi. Rencana informasi dan komunikasi pada kegiatan BPVP KENDARI dirangkum dalam kertas kerja yang ditunjukkan pada Lampiran 4.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pasal 3 Ayat (1) Huruf e menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pemantauan pengendalian intern” adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

Pemantauan pengendalian intern merupakan unsur pengendalian kelima atau terakhir. Pemantauan pengendalian intern bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern telah berjalan sesuai dengan yang telah dirancang di dalam disain pengendalian intern. Pemantauan dilaksanakan secara triwulanan. Hasil pemantauan setiap triwulan direkapitulasi untuk mendapatkan hasil pemantauan selama satu tahun, yang digunakan antara lain untuk bahan evaluasi pada akhir tahun (atau awal tahun berikutnya). Pemantauan ini menjadi tanggung jawab pimpinan unit kerja dan satuan kerja, sedangkan Satuan Tugas (Satgas) SPIP dapat membantu dalam melakukan pemantauan.

Evaluasi berjalannya sistem pengendalian dilakukan pada awal tahun berikutnya, bersamaan dengan penyusunan disain penyelenggaraan SPIP tahun berikutnya. Maksud dilaksanakannya secara bersamaan adalah agar hasil evaluasi tahun sebelumnya langsung dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam perbaikan disain pengendalian intern tahun berjalan yang akan segera disusun.

Untuk melengkapi kegiatan pengendalian risiko diperlukan pemantauan terhadap efektivitas rencana tindak pengendalian baik yang sudah berjalan maupun yang akan dibangun. Metode pemantauan, baik yang sudah ada maupun yang akan digunakan, dilakukan melalui evaluasi laporan, pengecekan kelengkapan, memverifikasi dokumen dan pelaksanaannya, serta metode pemantauan lainnya oleh pejabat / Satuan Tugas (Satgas) SPIP BPVP Kendari yang telah ditetapkan. Rancangan pemantauan terhadap kegiatan di BPVP Kendari dirangkum dalam kertas kerja yang ditunjukkan pada Lampiran 5.

BAB VI

PENUTUP

Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern BPVP Kendari merupakan dokumen acuan dalam penyelenggaraan SPIP pada tingkat kegiatan. Kegiatan yang dipilih adalah kegiatan utama BPVP Kendari terkait dengan tugas dan fungsi dan memberikan kontribusi yang besar terkait tercapainya visi misi masing-masing satuan kerja. Apabila kegiatan ini bisa berjalan secara efektif, maka visi misi dari satuan kerja kemungkinan besar juga akan tercapai.

Penyusunan Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern BPVP KENDARI pada tingkat kegiatan ini juga dapat dilakukan pada kegiatan- kegiatan lainnya yang dianggap mempunyai pengaruh atau kontribusi yang besar dalam pencapaian visi misi masing-masing satuan kerja ataupun visi misi BPVP Kendari.

Dokumen Desain BPVP Kendari ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu substansi dari dokumen ini yang berisi identifikasi dan analisis risiko, rancangan kegiatan pengendalian, informasi komunikasi dan pemantauan dapat terus di updating secara periodik sesuai dengan kondisi terkini, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar dalam pencapaian tujuan dan visi misi organisasi di lingkungan BPVP Kendari.

IDENTIFIKASI TUJUAN STRATEGIS

Visi : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kegiatan yang mendukung capaian tujuan/sasaran	
1	2	3	4	5	6	
1.	Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Memberikan Kontribusi Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Nasional	1. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan 3. Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas	1. Meningkatnya Jumlah Sarana dan Prasarana yang ditingkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaannya 2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan 3. Jumlah tenaga kerja yang meningkat produktivitasnya	1	Pembangunan dan/atau Renovasi Sarana Pendukung Pelatihan
					2	Pembangunan dan/atau Renovasi Sarana Pendukung Pelatihan
					3	Promosi Pelatihan Vokasi dan Pemagangan
					4	Pemberdayaan Alumni Pelatihan Vokasi dan Pemagangan
					5	Fasilitasi Pelayanan Kios Siap Kerja
					6	Fasilitasi Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri (FKLPI)
					7	Bimbingan dan Konsultasi Peningkatan Produktivitas

						8	Pengukuran Peningkatan Produktivitas Perusahaan Oleh UPTP
						9	Pelatihan Peningkatan Produktivitas
		4.	Terlaksananya Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja	4.	Terlaksananya Kompetisi Keahlian/ Keterampilan Tingkat Nasional	10	Kompetisi Keahlian / Keterampilan Tingkat Nasional Pelaksanaan Seleksi Daerah (SELEKDA ASC/WSC)
						11	Pengembangan Talenta Muda
						12	Penyusunan Program dan Modul PBK
		5.	Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Binalavotas	5.	Jumlah Tenaga Kerja Yang disertifikasi	13	SDM Bidang Sertifikasi yang dilatih
						14	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja
						15	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Berkeahlian Menengah Tinggi
		6.	Meningkatnya Kompetensi Instruktur dan Tenaga Pelatihan	6.	Jumlah Instruktur dan Tenaga Pelatihan yang di tingkatkan kompetensinya	16	Pelatihan Peningkatan Karir Instruktur Pemerintah Kompetisi Keahlian / Keterampilan Regional

			7.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas	7.	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan	17	Pelaksanaan PBK di UPTP
							18	PBK BLK Komunitas
							19	PBK di LPKS
							20	Pelatihan PFLK
							21	PBK di UPTD Binaan (PBK Prov. Kalimantan Selatan, PBK Prov. Kalimantan Timur, PBK Prov. Kalimantan Utara)
			8.	Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	8.	Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Internal	22	Layanan Umum Implementasi 5S
							23	Layanan Perkantoran
							24	Layanan Prasarana Internal
							25	Layanan Perencanaan dan Penganggaran
							26	Layanan Manajemen Keuangan

							27	Layanan Reformasi Kinerja
--	--	--	--	--	--	--	----	---------------------------

IDENTIFIKASI KEGIATAN & TUJUAN KEGIATAN

No	Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Keselarasan dengan tujuan/sasaran strategis	Operasional/ Ketaatan/Keuangan/Aset
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Binalavotas	Selaras	Operasional , Aset
2	Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan yang Berkualitas	Selaras	Operasional
3	Pengembangan dan Peningatan Produktivitas	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Selaras	Operasional
4	Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja	Terlaksananya Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja yang berkualitas	Selaras	Operasional
5	Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Binalavotas	Terlaksannnya Sertifikasi Kompetensi Kerja	Selaras	Operasional

6	Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Pelatihan	Meningkatnya Kompetensi Instruktur dan Tenaga Pelatihan	Selaras	Operasional
7	Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas	Selaras	Operasional
8	Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Terlaksananya Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Selaras	Keuangan, Aset

PERUMUSAN STRUKTUR ANALISIS RISIKO

Tujuan Perumusan	: Dimilikinya kerangka pikir (sebagai dasar mengidentifikasi dan menganalisis risiko) dengan merumuskan sumber risiko dan dampaknya, serta menganalisis pihak yang terkena dampak		
Nama Kegiatan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 2. Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan 3. Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas 4. Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja 5. Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Binalavotas 6. Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tanaga Pelatihan 7. Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas 8. Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 		
No.	Sumber	Dampak	
		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4
1.	Keterbatasan SDM	Ketidakseragaman proses pelaksanaan kegiatan	BPVP Kendari dan Masyarakat
2.	Standar Operasional Prosedur tidak ditaati	Pelaksanaan Kegiatan tidak optimal	BPVP kendari dan Masyarakat
3.	Keterbatasan Alokasi Anggaran	Pelaksanaan Kegiatan tidak optimal	BPVP Kendari dan Masyarakat
4.	Sarana dan Prasarana tidak mendukung	Pelaksanaan Kegiatan tidak optimal	BPVP Kendari dan Masyarakat
5.	Koordinasi Lemah	SDM Tidak Kompeten	BPVP Kendar idan Masyarakat

KERTAS KERJA PENYUSUNAN DAFTAR RISIKO BPVP KENDARI 2024

No.	Bisnis Proses			Pernyataan Risiko		Sumber Risiko		Controllabl e/ Uncontroll able	Dampak	Existing Control	Status (E/CE/ KE)	Kegiatan Pengendalian yg masih dibutuhkan	
	Kegiatan	No	Uraian Kegiatan	No	Uraian Risiko	Internal	Eksternal					Pencegahan	Mitigasi
1	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	1	Pembangunan dan/atau Renovasi Sarana Pendukung Pelatihan	1	Waktu Pembangunan/Renovasi tidak sesuai jadwal rencana	Finalisasi dokumen tender terlambat	Delegasi tugas panitia pengadaan barang dan jasa	C	Penambahan waktu pengerjaan dan denda keterlambatan	Rapat evaluasi progres pekerjaan	E	Koordinasi dengan biro umum	Evaluasi pekerjaan secara periodik (mingguan, bulanan, triwulan)
		2	Pembangunan dan/atau Renovasi Sarana Pendukung Pelatihan	2	Waktu Pembangunan miniatur tambang tidak sesuai jadwal rencana	Finalisasi dokumen tender terlambat	Delegasi tugas panitia pengadaan barang dan jasa	C	Penambahan waktu pengerjaan dan denda keterlambatan	Rapat evaluasi progres pekerjaan	CE	Koordinasi dengan biro umum	Evaluasi pekerjaan secara periodik (mingguan, bulanan, triwulan)
2	Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan	3	Promosi Pelatihan Vokasi dan Pemagangan	3	Promosi kurang sampai ke masyarakat luas dan industri	Belum terlaksana promosi secara langsung di sekolah ataupun kelurahan	Tidak semua masyarakat memiliki media sosial di Handphone	C	Kurangnya informasi tentang pelayanan yang ada di BPVP KENDARI kepada masyarakat	Rapat perencanaan kegiatan promosi	CE	Pembuatan banner dan video promosi di media sosial	Sosialisasi ke sekolah-sekolah dan kelurahan
		4	Pemberdayaan Alumni Pelatihan Vokasi dan Pemagangan	4	Tracing data alumni kurang lengkap		Kesediaan alumni untuk mengisi link survey kebjkerjaan alumni	U	Data tracking penempatan dan kebjkerjaan alumni masih rendah	menginfor masikan di media sosial	CE	Sosialisasi dan penekanan informasi pentingnya pengisian link survey kepada peserta pelatihan saat apel pagi	Pengambilan sertifikat mewajibkan alumni mengisi link survey kebjkerjaan

		5	Fasilitasi Pelayanan Kios Siap Kerja	5	Jumlah masyarakat yang menggunakan layanan kios siapkerja sedikit		Masyarakat belum memahami fungsi Kios SiapKerja	U	Fasilitas kios sudah lengkap, tapi pengunjung masih sedikit	Membuat video pelayanan di kios siap kerja	E	Memberi arahan kepada security untuk mengarahkan dan menunjukkan kios siap kerja	Pembuatan banner pelayanan kios siap Kerja
		6	Fasilitasi Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri (FKLPI)	6	Rapat FKLPI masih belum bisa menunjukkan data pasar kerja yang akurat di wilayah Beberapa Kabupaten		Belum di ketahui kualifikasi kebutuhan tenaga kerja di DU/DI	C	Presentase jumlah alumni yang bekerja/berusaha masih sangat kecil di banding jumlah masyarakat yang dilatih	Melakukan kunjungan ke DU/DI	E	Berdiskusi dan pemetaan kebutuhan pelatihan dengan DU/DI	Pembuatan program baru yang disesuaikan permintaan perusahaan
3	Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas	7	Bimbingan dan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	7	Keterbatasan jumlah peserta yang dapat mengikuti bimbingan dan konsultasi produktivitas		Kurangnya pemahaman UMKM dan DU/DI terkait peningkatan produktivitas	C	Masih sedikit pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan konsultasi produktivitas	Menginformasikan kepada pelaku usaha anggota dan mitra FKLPI	CE	Membuat matrik pelaksanaan pengukuran peningkatan produktivitas	
		8	Pengukuran Peningkatan Produktivitas Perusahaan Oleh UPTP	8	Keterbatasan personil yang dapat melakukan pengukuran peningkatan produktivitas di Perusahaan	Personil sebagian besar instruktur yang sedang menjalankan tugas mengajar siswa pelatihan yang masih berjalan	kesediaan waktu dan tempat perusahaan yang akan diukur	C	Pengukuran peningkatan produktivitas berjalan tidak sesuai rencana	Menyesuaikan jadwal instruktur dan kesediaan perusahaan	CE	Membuat matrik pelaksanaan pengukuran peningkatan produktivitas	
		9	Pelatihan Peningkatan Produktivitas	9	Jumlah peserta dan waktu pelaksanaan pelatihan tidak sesuai target		Minat masyarakat mengikuti pelatihan	C	Waktu pelaksanaan pelatihan mundur dari rencana	Menyesuaikan waktu pelaksanaan dengan jumlah peserta	E	Memberikan informasi menggunakan surat atau selebaran via media sosial	

										pelatihan			
4	Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja	10	Kompetisi Keahlian / Keterampilan Tingkat Nasional Pelaksanaan Seleksi Daerah (SELEKDA ASC/WSC)	10	Umur peserta lomba tidak dapat melanjutkan kompetisi di tingkat Asia/dunia	SDM tim rekrut kurang teliti dalam pemeriksaan berkas pendaftaran	Pemahaman calon kompetitor terhadap kelanjutan tingkatan lomba (daerah, nasional, asean dan dunia)	C	Kompetitor yang lolos seleksi tidak dapat melanjutkan kompetisi pada tingkatan berikutnya	Membuat persyaratan pendaftaran yang jelas dalam proses pendaftaran seleksi	E	Penambahan SDM dalam proses seleksi tingkat daerah	Sanksi administrasi berupa diskualifikasi kepesertaan kompetisi
		11	Pengembangan Talenta Muda	11	Narasumber yang kompeten untuk pelaksanaan kegiatan Telent Corner terbatas	Keterbatasan jumlah pegawai yang mempunyai kompetensi khusus	Minat masyarakat di bidang kompetensi tertentu	U	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan ketersediaan instruktur	menjalin kerjasama dengan asosiasi atau komunitas tertentu	E	Mencari rekomendasi instruktur yang kompeten dari asosiasi/komunitas	
		12	Penyusunan Program dan Modul PBK	12	Penyusunan program dan modul tidak sesuai dengan rencana	Jumlah tim dan waktu penyusunan yang terbatas	Persetujuan proposal dan uji coba yang memerlukan waktu	C	Waktu penyusunan program dan modul terlalu singkat	Memulai percobaan pembuatan produk inovasi	E	Evaluasi dan perbaikan dari hasil percobaan pembuatan inovasi	
5	Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Binalavotas	13	SDM Bidang Sertifikasi yang dilatih	13	Jumlah peserta kegiatan RCC Asesor Kompetensi tidak terpenuhi		Terdapat peserta yang mengundurkan diri	U	Kurangnya jumlah peserta RCC	Melihat data asesor yang hampir habis masa sertifikatnya	E	Mencari peserta pengganti dari data asesor di LSP	
		14	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja	14	Tidak terpenuhinya Tempat Uji Kompetensi sesuai Standar	Terdapat kelalaian pada saat proses verifikasi	Kelayakan tempat dan peralatan di UPTD		Pelaksanaan UJK tidak sesuai standar dan atau pelaksanaan UJK mundur dari	Membuat rekomendasi untuk melengkal peralatan di TUK	CE	Memundurkan jadwal UJK agar TUK mempunyai waktu melengkapi peralatan	

									jadwal yang seharusnya				
		15	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Berkeahlian Menengah Tinggi	15	LSP P2 BPVP KENDARI belum memiliki skema sertifikasi	Belum dibuatnya skema sertifikasi Mekanik Alat Berat	Belum adanya SKKNI yang menaungi bidang mekanik alat berat	C	LSP P2 BPVP KENDARI tidak dapat melaksanakan UJK untuk teknisi mekanik alat berat	Kerjasama dengan LSP P3	CE	Mengajukan surat permohonan UJK dengan LSP P3	
6	Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tanaga Pelatihan	16	Pelatihan Peningkatan Karir Instruktur Pemerintah Kompetisi Keahlian / Keterampilan Regional	16	Jumlah kompetitor pada masing-masing bidang lomba tidak terpenuhi sesuai target	Kurangnya promosi dan penyebaran informasi kepada calon kompetitor	Kualifikasi calon kompetitor tidak sesuai dengan persyaratan	U	KKIN Regional terlaksana namun jumlah peserta tidak sesuai target	Promosi secara masif melalui berbagai media	E	Pengontrolan jumlah pendaftar kompetisi secara intens	Koordinasi kepada stageholder terkait untuk pengembangan kompetensi kompetitor
				17	Kesesuaian kondisi sarana prasarana lomba tidak sesuai MTP/standar KKIN	Revitalisasi sarana prasarana belum sesuai dengan standar	-	C	Sarana dan prasarana Lomba tidak sesuai standar	Koordinasi dengan Koordinator Kompetisi dari pusat / Direktorat Bina Intala	E	Melakukan Revitalisasi sarana dan prasarana di tiap bidang lomba sesuai standar	
7	Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas	17	Pelaksanaan PBK di UPTP	18	Beberapa program pelatihan PBK level operator dilaksanakan tidak sesuai dengan timeline yang ada	Penyesuaian dengan jumlah dan minat pendaftar	Minat masyarakat yang mendaftar pada program tertentu saja		Mundurinya timeline dengan aktualisasi kegiatan	Membuka program yg dengan minatnya tinggi terlebih dahulu	CE	Terus promosi terkait program pelatihan di BPVP KENDARI	
				19	Jumlah lulusan pelatihan teknisi tidak sesuai target	Berjalannya program teknisi yang baru	Siswa teknisi mengundurkan diri	U	jumlah lulusan kurang dari target	selalu memberi motivasi dan semangat	CE	Pembuatan susrat pernyataan kesanggupan menyelesaikan	

									pada siswa teknisi		n pelatihan	
		20	Jumlah peserta pelatihan E-Training tidak sesuai target		Berkurangnya jumlah peserta antara offline dan online	U	Kekurangan peserta saat pelatihan offline	pemantauan secara intens saat pelatihan online	CE	pemberihan pemahaman dan surat pernyataan kesanggupan mengikuti pelatihan sampai selesai		
18	PBK BLK Komunitas	21	Kesulitan mencari calon peserta di BLK Komunitas	Kurangnya koordinasi	Letak BLK Komunitas yang jauh	C	Target peserta pelatihan tidak terpenuhi	koordinasi dengan PIC BLKK agar bisa mendapat 16 peserta	E	penundaan pencairan dana bilamana belum didapat jumlah peserta yang sesuai		
19	PBK di LPKS	22	Administrasi di LPK berpotensi tidak sesuai dengan Juknis	Pemberian informasi yang kurang lengkap	Stakeholder tidak segera untuk bisa memenuhi kekurangan administrasi	C	Perbedaan persepsi dan pencetakan dokumen laporan	pemberian format / tempate yang seragam	E	Koordinasi secara intensif dengan pengelola LPK		
20	Pelatihan PFLK	23	Tidak terpenuhinya target jumlah peserta PFLK		Stakeholder hanya minat di program pelatihan tertentu	C	Target peserta dan target PNBP tidak terpenuhi	melakukan koordinasi dengan stakeholder PFLK	E	Pembuatan RAB yang sesuai peraturan sehingga stakeholder bisa melakukan kegiatan PFLK di BPVP		
21	PBK di UPTD Binaan (BLKK Kolaka, BLK Buton, BLK Konawe Selatan, BLK Konawe Utara, BLK Kolaka Utara)	24	Keterlambatan penyelesaian laporan kegiatan PBK di UPTD	Kurangnya pengawasan terhadap proses perencanaan kegiatan	Keterbatasan SDM yang kompeten	C	Pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sesuai target dan rencana	Monitoring evaluasi dengan PIC kegiatan di UPTD	CE	Koordinasi dengan PIC kegiatan di UPTD	Punishment berupa pengurangan jumlah paket pelatihan pada tahun berikutnya	

				25	Pelaporan pertanggungjawaban (SPJ) terlambat dilaporkan	SDM PIC Pelaksana UPTD kurang melakukan penekanan target pengumpulan SPJ	UPTD lambat dalam pembuatan SPJ	C	Kelengkapan administrasi pelaporan akan terlambat dilaporkan	Memberikan tenggat waktu pengumpulan Laporan Kegiatan	E	Koordinasi dan terus mengingatkan terkait pembuatan dan pengumpulan SPJ	Punishment berupa pengurangan jumlah paket pelatihan pada tahun berikutnya
8	Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	22	Layanan Umum Implementasi 5S	26	Implementasi 5S belum menyeluruh ke tiap bidang dan kejuruan	Belum ada masukan dan usulan kegiatan dari bidang/kejuruan sesuai dengan kebutuhan	-	C	Penerapan 5S belum maksimal dan menyeluruh	Melakukan Pemerataan perbaikan dan penerapan 5S ke seluruh bidang	E	Melakukan komunikasi dan menerima masukan/usulan dari tiap bidang/kejuruan	
		23	Layanan Perkantoran	27	Penyesuaian gelar dan alih jenjang kataegori pegawai terlambat		Menunggu pedoman dan peraturan terbit	C	keterlambatan penyesuaian administrasi pegawai	koordinasi dengan kantor pusat	E	menginformasikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk kelengkapan dokumen	
				28	Pemeliharaan Gedung dan Peralatan pelatihan tidak sepenuhnya terpelihara	Kerusakan terjadi secara bergantian di tiap bidang ataupun kejuruan			C	Banyak sarana prasarana yang masih mengalami kerusakan	selalu menerima laporan kerusakan untuk ditindak lanjuti	CE	koordinasi dan penentuan skala prioritas kerusakan yang akan dipelihara/diperbaiki

		24	Layanan Prasarana Internal	29	Belanja modal peralatan dan mesin tidak semua bidang terpenuhi	Pembelian berdasarkan skala prioritas permohonan			beberapa bidang belum bisa diupdate peralatannya	penentuan berdasarkan skala prioritas	E	menyesuaikan anggaran dengan prioritas yang akan dibelanjakan	
		25	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	30	Revisi anggaran terlambat diajukan	Penyisiran anggaran ada yang terlewat	Batas waktu sudah ditentukan	C	pelaksanaan kegiatan terhambat	koordinasi dan pemantauan anggaran kegiatan	E	Rapat manajemen setiap bulan dan triwulan	
		26	Layanan Majemen Keuangan	31	Kesalahan Pencatatan transaksi keuangan dan aset	keterbatasan personil SDM yang mencatat		C	Terjadi selisih jumlah aset yang terdata	sinkronisasi data secara berkala	CE	penambahan SDM untuk membantu pencatatan keuangan dan aset	
		27	Layanan Reformasi Kinerja	32	Pembuatan dan penggandaan laporan memerlukan waktu yang relatif panjang	pembuatan dokumen dengan personil yang terbatas	Pihak percetakan memerlukan waktu yang sedikit lama	C	dokumen laporan lmbat dicetak	pembuatan dokumen dalam waktu yang terjadwal	CE	koordinasi dengan pihak percetakan dokumen	

Mengetahui,
Kepala

AMRAN,ST
NIP. 19830312 200901 1 014

KENDARI, Januari 2024

Ketua Satgas SPIP
Kasubag Umum

ANSHARI,S.SOS.,M.Si
NIP. 19770731 200312 1 005

DAFTAR PENILAIAN RISIKO

Unit Kerja : Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari

Program : Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

No.	Bisnis Proses			Pernyataan Risiko		Sumber Risiko		Controllable/ Uncontrollable	Dampak	Skor Kemungkinan terjadi	Skor Dampak	Total Skor
	Kegiatan	No	Uraian Kegiatan	No	Uraian Risiko	Internal	Eksternal					
1	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	1	Pembangunan dan/atau Renovasi Sarana Pendukung Pelatihan	1	Waktu Pembangunan/Renovasi tidak sesuai jadwal rencana	Finalisasi dokumen tender terlambat	Delegasi tugas panitia pengadaan barang dan jasa	C	Penambahan waktu pengerjaan dan denda keterlambatan	2,50	2,55	5,05
		2	Pembangunan dan/atau Renovasi Sarana Pendukung Pelatihan	2	Waktu Pembangunan miniatur tambang tidak sesuai jadwal Rencana	Finalisasi dokumen tender terlambat	Delegasi tugas panitia pengadaan barang dan jasa	C	Penambahan waktu pengerjaan dan denda keterlambatan	2,80	1,90	4,70
2	Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan	3	Promosi Pelatihan Vokasi dan Pemagangan	3	Promosi kurang sampai ke masyarakat luas dan industri	Belum terlaksana promosi secara langsung di sekolah ataupun kelurahan	Tidak semua masyarakat memiliki media sosial di Handphone	C	Kurangnya informasi tentang pelayanan yang ada di BPVP Kendari kepada masyarakat	2,65	2,20	4,85
		4	Pemberdayaan Alumni Pelatihan Vokasi dan Pemagangan	4	Tracing data alumni kurang lengkap		Kesediaan alumni untuk mengisi link survey pekerjaan alumni	U	Data tracking penempatan dan keberkerjaan alumni masih rendah	2,75	2,75	5,50
		5	Fasilitasi Pelayanan Kios Siap Kerja	5	Jumlah masyarakat yang		Masyarakat belum memahami	U	Fasilitas kios sudah lengkap, tapi pengunjung masih sedikit	2,15	1,90	4,05

					menggunakan layanan kios siapkerja sedikit		fungsi Kios SiapKerja					
		6	Fasilitasi Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri (FKLPI)	6	Rapat FKLPI masih belum bisa menunjukkan data pasar kerja yang akurat di wilayah Kalimantan Timur		Belum di ketahui kualifikasi kebutuhan tenaga kerja di DU/DI	C	Presentase jumlah alumni yang bekerja/berusaha masih sangat kecil di banding jumlah masyarakat yang dilatih	2,25	1,85	4,10
3	Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas	7	Bimbingan dan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	7	Keterbatasan jumlah peserta yang dapat mengikuti bimbingan dan konsultasi produktivitas		Kurangnya pemahaman UMKM dan DU/DI terkait peningkatan produktivitas	C	Masih sedikit pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan konsultasi produktivitas	2,50	1,80	4,30
		8	Pengukuran Peningkatan Produktivitas Perusahaan Oleh UPTP	8	Keterbatasan personil yang dapat melakukan pengukuran peningkatan produktivitas di Perusahaan	Personil sebagian besar instruktur yang sedang menjalankan tugas mengajar siswa pelatihan yang masih berjalan	kesediaan waktu dan tempat perusahaan yang akan diukur	C	Pengukuran peningkatan produktivitas berjalan tidak sesuai rencana	2,45	1,85	4,30
		9	Pelatihan Peningkatan Produktivitas	9	Jumlah peserta dan waktu pelaksanaan pelatihan tidak sesuai target		Minat masyarakat mengikuti pelatihan	C	Waktu pelaksanaan pelatihan mundur dari rencana	2,40	1,75	4,15
4	Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja	10	Kompetisi Keahlian / Keterampilan Tingkat Nasional Pelaksanaan Seleksi Daerah (SELEKDA ASC/WSC)	10	Umur peserta lomba tidak dapat melanjutkan kompetisi di tingkat Asia/dunia	SDM tim rekrut kurang teliti dalam pemeriksaan berkas pendaftaran	Pemahaman calon kompetitor terhadap kelanjutan tingkatan lomba (daerah, nasional, asean dan dunia)	C	Kompetitor yang lolos seleksi tidak dapat melanjutkan kompetisi pada tingkatan berikutnya	2,60	1,65	4,25
		11	Pengembangan Talenta Muda	11	Narasumber yang kompeten untuk pelaksanaan	Keterbatasan jumlah pegawai yang mempunyai	Minat masyarakat di bidang kompetensi	U	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan ketersediaan instruktur	2,45	1,95	4,40

					kegiatan Telent Corner terbatas	kompetensi khusus	tertentu					
		12	Penyusunan Program dan Modul PBK	12	Penyusunan program dan modul tidak sesuai dengan rencana	Jumlah tim dan waktu penyusunan yang terbatas	Persetujuan proposal dan ujicoba yang memerlukan waktu	C	Waktu penyusunan program dan modul terlalu singkat	1,95	2,25	4,20
5	Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Binalavotas	13	SDM Bidang Sertifikasi yang dilatih	13	Jumlah peserta kegiatan RCC Asesor Kompetensi tidak terpenuhi		Terdapat peserta yang mengundurkan diri	U	Kurangnya jumlah peserta RCC	1,95	2,85	4,80
		14	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja	14	Tidak terpenuhinya Tempat Uji Kompetensi sesuai Standar	Terdapat kelalaian pada saat proses verifikasi	Kelayakan tempat dan peralatan di UPTD		Pelaksanaan UJK tidak sesuai standar dan atau pelaksanaan UJK mundur dari jadwal yang seharusnya	2,45	2,35	4,80
		15	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Berkeahlian Menengah Tinggi	15	LSP P2 BPVP KENDARI belum memiliki skema sertifikasi	Belum dibuatnya skema sertifikasi Mekanik Alat Berat	Belum adanya SKKNI yang menaungi bidang mekanik alat berat	C	LSP P2 BPVP KENDARI tidak dapat melaksanakan UJK untuk teknisi mekanik alat berat	3,05	2,50	5,55
6	Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tanaga Pelatihan	16	Pelatihan Peningkatan Karir Instruktur Pemerintah Kompetensi Keahlian / Keterampilan Regional	16	Jumlah kompetitor pada masing-masing bidang lomba tidak terpenuhi sesuai target	Kurangnya promosi dan penyebarluasan informasi kepada calon kompetitor	Kualifikasi calon kompetitor tidak sesuai dengan persyaratan	U	KKIN Regional terlaksana namun jumlah peserta tidak sesuai target	2,85	2,30	5,15
				17	Kesesuaian kondisi sarana prasarana lomba tidak sesuai MTP/ standar KKIN	Revitalisasi sarana prasarana belum sesuai dengan standar	-	C	Sarana dan prasarana Lomba tidak sesuai standar	2,80	2,60	5,40
7	Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas	17	Pelaksanaan PBK di UPTP	18	Beberapa program pelatihan PBK level operator dilaksanakan tidak sesuai dengan timeline yang ada	Penyesuaian dengan jumlah dan minat pendaftar	Minat masyarakat yang mendaftar pada program tertentu saja		Mundurinya timeline dengan aktualisasi kegiatan	2,85	2,25	5,10
				19	Jumlah lulusan pelatihan teknisi	Berjalannya program	Siswa teknisi mengundurkan	U	jumlah lulusan kurang dari target	2,80	1,85	4,65

			tidak sesuai target	teknisi yang baru	n diri						
		20	Jumlah peserta pelatihan E-Training tidak sesuai target		Berkurangnya jumlah peserta antara offline dan online	U	Kekurangan peserta saat pelatihan offline	2,50	1,85	4,35	
18	PBK BLK Komunitas	21	Kesulitan mencari calon peserta di BLK Komunitas	Kurangnya koordinasi	Letak BLK Komuniats yang jauh	C	Target peserta pelatihan tidak terpenuhi	2,05	2,90	4,95	
19	PBK di LPKS	22	Administrasi di LPK berpotensi tidak sesuai dengan Juknis	Pemberian informasi yang kurang lengkap	Stakeholder tidak segera untuk bisa memenuhi kekurangan administrasi	C	Perbedaan persepsi dan pencetakan dokumen laporan	2,00	2,75	4,75	
20	Pelatihan PFLK	23	Tidak terpenuhinya target jumlah peserta PFLK		Stakeholder hanya minat di proqram pelatihan tertentu	C	Target peserta dan target PNBPN tidak terpenuhi	2,95	2,80	5,75	
21	PBK di UPTD Binaan (BLKK Kolaka Utara, BLK Kolaka, BLK Konawe Selatan, BLK Buton, BLK Konawe Utara)	24	Keterlambatan penyelesaian laporan kegiatan PBK di UPTD	Kurangnya pengawasan terhadap proses perencanaan kegiatan	Keterbatasan SDM yang kompeten	C	Pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sesuai target dan rencana	2,65	1,90	4,55	
		25	Pelaporan pertanggungjawaban (SPJ) terlambat dilaporkan	SDM PIC Pelaksana UPTD kurang melakukan penekanan target pengumpulan SPJ	UPTD lambat dalam pembuatan SPJ	C	Kelengkapan administrasi pelaporan akan terlambat dilaporkan	2,70	2,35	5,05	

8	Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan	22	Layanan Umum Implementasi 5S	26	Implementasi 5S belum menyeluruh ke tiap bidang dan kejuruan	Belum ada masukan dan usulan kegiatan dari bidang/kejuruan sesuai dengan	-	C	Penerapan 5S belum maksimal dan menyeluruh	2,25	2,70	4,95
---	---	----	------------------------------	----	--	--	---	---	--	------	------	-------------

Produktivitas				kebutuhan								
	23	Layanan Perkantoran	27	Penyesuaian gelar dan alih jenjang kataegori pegawai terlambat		Menunggu pedoman dan peraturan terbit	C	keterlambatan penyesuaian administrasi pegawai	2,50	2,80	5,30	
			28	Pemeliharaan Gedung dan Peralatan pelatihan tidak sepenuhnya terpelihara	Kerusakan terjadi secara bergantian di tiap bidang ataupun kejuruan			C	Banyak sarana prasarana yang masih mengalami kerusakan	2,90	2,30	5,20
	24	Layanan Prasarana Internal	29	Belanja modal peralatan dan mesin tidak semua bidang terpenuhi	Pembelian berdasarkan skala prioritas permohonan				beberapa bidang belum bisa diupdate peralatannya	2,60	2,30	4,90
	25	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	30	Revisi anggaran terlambat diajukan	Penyisiran anggaran ada yang terlewat	Batas waktu sudah ditentukan	C	pelaksanaan kegiatan terhambat	2,60	2,40	5,00	
	26	Layanan Majemen Keuangan	31	Kesalahan Pencatatan transaksi keuangan dan aset	keterbatasan personil SDM yang mencatat		C	Terjadi selisih jumlah aset yang terdata	2,35	2,35	4,70	
	27	Layanan Reformasi Kinerja	32	Pembuatan dan penggandaan laporan memerlukan waktu yang relatif panjang	pembuatan dokumen dengan personil yang terbatas	Pihak percetakan memerlukan waktu yang sedikit lama	C	dokumen laporan lmbat dicetak	2,05	1,90	3,95	

Mengetahui,
Kepala

Amran, ST
NIP. 19830312 200901 1 014

KENDARI, Januari 2024

Ketua Satgas SPIP
Kasubag Umum

Anshari,S.Sos.,M.Si
NIP. 19770731 200312 1 005

KERTAS KERJA PENGISIAN SKALA DAMPAK DAN KEMUNGKINAN

1. Sangat Kecil = Defisiensi atau akibat tidak adanya pelayanan sangat kecil
2. Kecil = Defisiensi atau akibat tidak adanya pelayanan kecil dan tanpa adanya komentar
3. Besar = Defisiensi atau akibat tidak adanya pelayanan besar dan dengan adanya beberapa komentar
4. Sangat Besar = Defisiensi atau akibat tidak adanya pelayanan sangat besar dan dengan adanya banyak sekali komentar

KERTAS KERJA PENYUSUNAN STATUS DAN PETA RISIKO

Peringkat Risiko	Nomor Risiko	Nama Risiko	Nilai Rata - Rata Kemungkinan	Nilai Rata - Rata Dampak	Total skor	Tingkat Risiko	Penjelasan
10	1	Waktu Pembangunan/ Renovasi tidak sesuai jadwal rencana	2,50	2,55	5,05	RENDAH	Diambil tindakan jika diperlukan dan apabila tersedia sumber daya
20	2	Waktu Pembangunan miniatur tambang tidak sesuai jadwal rencana	2,80	1,90	4,70	RENDAH	Diambil tindakan jika diperlukan dan apabila tersedia sumber daya
15	3	Promosi kurang sampai ke masyarakat luas dan industri	2,65	2,20	4,85	RENDAH	Diambil tindakan jika diperlukan dan apabila tersedia sumber daya
3	4	Tracing data alumni kurang lengkap	2,75	2,75	5,50	RENDAH	Diambil tindakan jika diperlukan dan apabila tersedia sumber daya
31	5	Jumlah masyarakat yang menggunakan layanan kios siapkerja sedikit	2,15	1,90	4,05	RENDAH	Diambil tindakan jika diperlukan dan apabila tersedia sumber daya
30	6	Rapat FKLPI masih belum bisa menunjukkan data pasar kerja yang akurat di wilayah Kalimantan Timur	2,25	1,85	4,10	RENDAH	Diambil tindakan jika diperlukan dan apabila tersedia sumber daya
26	7	Keterbatasan jumlah peserta yang dapat mengikuti bimbingan dan konsultasi produktivitas	2,50	1,80	4,30	RENDAH	Diambil tindakan jika diperlukan dan apabila tersedia sumber daya
25	8	Keterbatasan pernosil yang dapat melakukan pengukuran peningkatan produktivitas di Perusahaan	2,45	1,85	4,30	RENDAH	Diambil tindakan jika diperlukan dan apabila tersedia sumber daya
29	9	Jumlah peserta dan waktu pelaksanaan pelatihan tidak sesuai target	2,40	1,75	4,15	RENDAH	Diambil tindakan jika diperlukan dan apabila tersedia sumber daya
27	10	Umur peserta lomba tidak dapat melanjutkan kompetisi di tingkat Asia/dunia	2,60	1,65	4,25	RENDAH	Diambil tindakan jika diperlukan dan apabila tersedia sumber daya
23	11	Narasumber yang kompeten untuk pelaksanaan kegiatan Telent Corner terbatas	2,45	1,95	4,40	RENDAH	Diambil tindakan jika diperlukan dan apabila tersedia sumber daya
28	12	Penyusunan program dan modul tidak sesuai dengan rencana	1,95	2,25	4,20	RENDAH	Diambil tindakan jika diperlukan dan apabila tersedia sumber daya
17	13	Jumlah peserta kegiatan RCC Asesor Kompetensi tidak terpenuhi	1,95	2,85	4,80	RENDAH	Diambil tindakan jika diperlukan dan apabila tersedia sumber daya
16	14	Tidak terpenuhinya Tempat Uji Kompetensi sesuai Standar	2,45	2,35	4,80	RENDAH	Diambil tindakan jika diperlukan dan apabila tersedia sumber daya
2	15	LSP P2 BPVP KENDARI belum memiliki skema sertifikasi	3,05	2,50	5,55	RENDAH	Diambil tindakan jika diperlukan dan apabila tersedia sumber daya
7	16	Jumlah kompetitor pada masing-masing bidang lomba tidak terpenuhi sesuai target	2,85	2,30	5,15	RENDAH	Diambil tindakan jika diperlukan dan apabila tersedia sumber daya
4	17	Kesesuaian kondisi sarana prasarana lomba tidak sesuai MTP/ standar KKIN	2,80	2,60	5,40	RENDAH	Diambil tindakan jika diperlukan dan apabila tersedia sumber daya
8	18	Beberapa program pelatihan PBK level operator dilaksanakan tidak sesuai dengan timeline yang	2,85	2,25	5,10	RENDAH	Diambil tindakan jika diperlukan dan apabila tersedia sumber daya

		ada					
21	19	Jumlah lulusan pelatihan teknisi tidak sesuai target	2,80	1,85	4,65	RENDAH	Diambil tindakan jika diperlukan dan apabila tersedia sumber daya
24	20	Jumlah peserta pelatihan E-Training tidak sesuai target	2,50	1,85	4,35	RENDAH	Diambil tindakan jika diperlukan dan apabila tersedia sumber daya
13	21	Kesulitan mencari calon peserta di BLK Komunitas	2,05	2,90	4,95	RENDAH	Diambil tindakan jika diperlukan dan apabila tersedia sumber daya
18	22	Administrasi di LPK berpotensi tidak sesuai dengan Juknis	2,00	2,75	4,75	RENDAH	Diambil tindakan jika diperlukan dan apabila tersedia sumber daya
1	23	Tidak terpenuhinya target jumlah peserta PFLK	2,95	2,80	5,75	RENDAH	Diambil tindakan jika diperlukan dan apabila tersedia sumber daya
22	24	Keterlambatan penyelesaian laporan kegiatan PBK di UPTD	2,65	1,90	4,55	RENDAH	Diambil tindakan jika diperlukan dan apabila tersedia sumber daya
9	25	Pelaporan pertanggungjawaban (SPJ) terlambat dilaporkan	2,70	2,35	5,05	RENDAH	Diambil tindakan jika diperlukan dan apabila tersedia sumber daya
12	26	Implementasi 5S belum menyeluruh ke tiap bidang dan kejuruan	2,25	2,70	4,95	RENDAH	Diambil tindakan jika diperlukan dan apabila tersedia sumber daya
5	27	Penyesuaian gelar dan alih jenjang kataegori pegawai terlambat	2,50	2,80	5,30	RENDAH	Diambil tindakan jika diperlukan dan apabila tersedia sumber daya
6	28	Pemeliharaan Gedung dan Peralatan pelatihan tidak sepenuhnya terpelihara	2,90	2,30	5,20	RENDAH	Diambil tindakan jika diperlukan dan apabila tersedia sumber daya
14	29	Belanja modal peralatan dan mesin tidak semua bidang terpenuhi	2,60	2,30	4,90	RENDAH	Diambil tindakan jika diperlukan dan apabila tersedia sumber daya
11	30	Revisi anggaran terlambat diajukan	2,60	2,40	5,00	RENDAH	Diambil tindakan jika diperlukan dan apabila tersedia sumber daya
19	31	Kesalahan Pencatatan transaksi keuangan dan aset	2,35	2,35	4,70	RENDAH	Diambil tindakan jika diperlukan dan apabila tersedia sumber daya
32	32	Pembuatan dan penggandaan laporan memerlukan waktu yang relatif panjang	2,05	1,90	3,95	SANGAT RENDAH	Diambil tindakan jika diperlukan dan apabila tersedia sumber daya

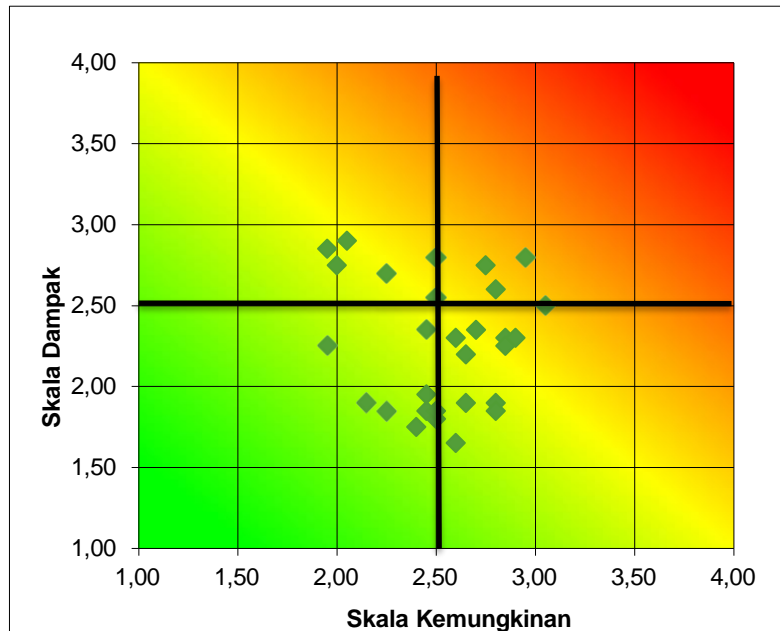
Mengetahui,
Kepala

Amran, ST
NIP. 19830312 200901 1 014

KENDARI, Januari 2024
Ketua Satgas SPIP
Kasubag Umum

Anshari,S.Sos.,M.Si
NIP. 19770731 200312 1 005

PETA RISIKO



MATRIK RISIKO

LEVEL KEMUNGKINAN	SANGAT SERING	Sedang	Tinggi	Sangat Besar	Sangat Besar
	SERING	Sedang	Sedang	Tinggi	Sangat Besar
	JARANG	Kecil	Kecil	Sedang	Sedang
	SANGAT JARANG	Kecil	Kecil	Kecil	Sedang
		SANGAT KECIL	KECIL	BESAR	SANGAT BESAR
		LEVEL DAMPAK			

Kategori Level	Skor	Tindakan yg diambil	Jml Risiko
Sangat Rendah	≤ 3.99	Tidak diperlukan tindakan	1
Rendah	$4 \leq 7.99$	Diambil tindakan jika diperlukan dan apabila tersedia sumber daya	31
Tinggi	$8 \leq 11.99$	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko	0
Sangat Tinggi	$12 \leq 16$	Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko	0
Total			32

KERTAS KERJA EVALUASI (KKE) RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Unit Kerja : Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari

Program : Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Peringkat Risiko	Nomor Risiko	Pernyataan Risiko	Sumber Risiko		Dampak	Existing Control	Status (E/CE/KE)	Kegiatan Pengendalian yg masih dibutuhkan	
			Internal	Eksternal				Pencegahan	Mitigasi
10	1	Waktu Pembangunan/Renovasi tidak sesuai jadwal rencana	Finalisasi dokumen tender terlambat	Delegasi tugas panitia pengadaan barang dan jasa	Penambahan waktu pengerjaan dan denda keterlambatan	Rapat evaluasi progres pekerjaan	E	Koordinasi dengan biro umum	Evaluasi pekerjaan secara periodik (mingguan, bulanan, triwulan)
20	2	Waktu Pembangunan miniatur tambang tidak sesuai jadwal rencana	Finalisasi dokumen tender terlambat	Delegasi tugas panitia pengadaan barang dan jasa	Penambahan waktu pengerjaan dan denda keterlambatan	Rapat evaluasi progres pekerjaan	CE	Koordinasi dengan biro umum	Evaluasi pekerjaan secara periodik (mingguan, bulanan, triwulan)
15	3	Promosi kurang sampai ke masyarakat luas dan industri	Belum terlaksana promosi secara langsung di sekolah ataupun kelurahan	Tidak semua masyarakat memiliki media sosial di Handphone	Kurangnya informasi tentang pelayanan yang ada di BPVP Kendari kepada masyarakat	Rapat perencanaan kegiatan promosi	CE	Pembuatan banner dan video promosi di media sosial	Sosialisasi ke sekolah-sekolah dan kelurahan
3	4	Tracing data alumni kurang lengkap		Kesediaan alumni untuk mengisi link survey pekerjaan alumni	Data tracking penempatan dan pekerjaan alumni masih rendah	menginformasikan di media sosial	CE	Sosialisasi dan penekanan informasi pentingnya pengisian link survey kepada peserta pelatihan saat apel pagi	Pengambilan sertifikat mewajibkan alumni mengisi link survey pekerjaan
31	5	Jumlah masyarakat yang menggunakan layanan kios siapkerja sedikit		Masyarakat belum memahami fungsi Kios SiapKerja	Fasilitas kios sudah lengkap, tapi pengunjung masih sedikit	Membuat video pelayanan di kios siap kerja	E	Memberi arahan kepada security untuk mengarahkan dan menunjukkan kios siap kerja	Pembuatan banner pelayanan kios siap Kerja
30	6	Rapat FKLPI masih belum bisa menunjukkan data		Belum di ketahui kualifikasi	Presentase jumlah alumni yang	Melakukan kunjungan ke DU/DI	E	Berdiskusi dan pemetaan kebutuhan	Pembuatan program baru yang disesuaikan permintaan perusahaan

		pasar kerja yang akurat di wilayah Beberapa Kabupaten		kebutuhan tenaga kerja di DU/DI	bekerja/berusaha masih sangat kecil di banding jumlah masyarakat yang dilatih			pelatihan dengan DU/DI	
26	7	Keterbatasan jumlah peserta yang dapat mengikuti bimbingan dan konsultasi produktivitas		Kurangnya pemahaman UMKM dan DU/DI terkait peningkatan produktivitas	Masih sedikit pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan konsultasi produktivitas	Menginformasikan kepada pelaku usaha anggota dan mitra FKLP	CE	Membuat matrik pelaksanaan pengukuran peningkatan produktivitas	
25	8	Keterbatasan pernosil yang dapat melakukan pengukuran peningkatan produktivitas di Perusahaan	Personil sebagian besar instruktur yang sedang menjalankan tugas mengajar siswa pelatihan yang masih berjalan	kesediaan waktu dan tempat perusahaan yang akan diukur	Pengukuran peningkatan produktivitas berjalan tidak sesuai rencana	Menyesuaikan jadwal instruktur dan kesediaan perusahaan	CE	Membuat matrik pelaksanaan pengukuran peningkatan produktivitas	
29	9	Jumlah peserta dan waktu pelaksanaan pelatihan tidak sesuai target		Minat masyarakat mengikuti pelatihan	Waktu pelaksanaan pelatihan mundur dari rencana	Menyesuaikan waktu pelaksanaan dengan jumlah peserta pelatihan	E	Memberikan informasi menggunakan surat atau selebaran via media sosial	
27	10	Umur peserta lomba tidak dapat melanjutkan kompetisi di tingkat Asia/dunia	SDM tim rekrut kurang teliti dalam pemeriksaan berkas pendaftaran	Pemahaman calon kompetitor terhadap kelanjutan tingkatan lomba (daerah, nasional, asean dan dunia)	Kompetitor yang lolos seleksi tidak dapat melanjutkan kompetisi pada tingkatan berikutnya	Membuat persyaratan pendaftaran yang jelas dalam proses pendaftaran seleksi	E	Penambahan SDM dalam proses seleksi tingkat daerah	Sanksi administrasi berupa diskualifikasi kepesertaan kompetisi
23	11	Narasumber yang kompeten untuk pelaksanaan kegiatan Telent Corner terbatas	Keterbatasan jumlah pegawai yang mempunyai kompetensi khusus	Minat masyarakat di bidang kompetensi tertentu	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan ketersediaan instruktur	menjalin kerjasama dengan asosiasi atau komunitas tertentu	E	Mencari rekomendasi instruktur yang kompeten dari asosiasi/komunitas	

28	12	Penyusunan program dan modul tidak sesuai dengan rencana	Jumlah tim dan waktu penyusunan yang terbatas	Persetujuan proposal dan ujicoba yang memerlukan Waktu	Waktu penyusunan program dan modul terlalu singkat	Memulai percobaan pembuatan produk inovasi	E	Evaluasi dan perbaikan dari hasil percobaan pembuatan inovasi	
17	13	Jumlah peserta kegiatan RCC Asesor Kompetensi tidak terpenuhi		Terdapat peserta yang mengundurkan diri	Kurangnya jumlah peserta RCC	Melihat data asesor yang hampir habis masa sertifikatnya	E	Mencari peserta pengganti dari data asesor di LSP	
16	14	Tidak terpenuhinya Tempat Uji Kompetensi sesuai Standar	Terdapat kelalaian pada saat proses verifikasi	Kelayakan tempat dan peralatan di UPTD	Pelaksanaan UJK tidak sesuai standar dan atau pelaksanaan UJK mundur dari jadwal yang seharusnya	Membuat rekomendasi untuk melengkali peralatan di TUK	CE	Memundurkan jadwal UJK agar TUK mempunyai waktu melengkapi peralatan	
2	15	LSP P2 BPVP KENDARI belum memiliki skema sertifikasi	Belum dibuatnya skema sertifikasi Mekanik Alat Berat	Belum adanya SKKNI yang menaungi bidang mekanik alat Berat	LSP P2 BPVP KENDARI tidak dapat melaksanakan UJK untuk teknisi mekanik alat berat	Kerjasama dengan LSP P3	CE	Mengajukan surat permohonan UJK dengan LSP P3	
7	16	Jumlah kompetitor pada masing-masing bidang lomba tidak terpenuhi sesuai target	Kurangnya promosi dan penyebarluasan informasi kepada calon kompetitor	Kualifikasi calon kompetitor tidak sesuai dengan persyaratan	KKIN Regional terlaksana namun jumlah peserta tidak sesuai target	Promosi secara masif melalui berbagai media	E	Pengontrolan jumlah pendaftar kompetisi secara intens	Koordinasi kepada stageholder terkait untuk pengembangan kompetensi kompetitor
4	17	Kesesuaian kondisi sarana prasarana lomba tidak sesuai MTP/ standar KKIN	Revitalisasi sarana prasarana belum sesuai dengan standar	-	Sarana dan prasarana Lomba tidak sesuai standar	Koordinasi dengan Koordinator Kompetisi dari pusat / Direktorat Bina Intala	E	Melakukan Revitalisasi sarana dan prasarana di tiap bidang lomba sesuai standar	
8	18	Beberapa program pelatihan PBK level operator dilaksanakan tidak sesuai dengan timeline yang ada	Penyesuaian dengan jumlah dan minat pendaftar	Minat masyarakat yang mendaftar pada program tertentu saja	Mundurinya timeline dengan aktualisasi kegiatan	Membuka program yg dengan minatnya tinggi terlebih dahulu	CE	Terus promosi terkait program pelatihan di BPVP KENDARI	
21	19	Jumlah lulusan pelatihan teknisi tidak sesuai target	Berjalannya program teknisi yang baru	Siswa teknisi mengundurkan diri	jumlah lulusan kurang dari target	selalu memberi motivasi dan semangat pada siswa teknisi	CE	Pembuatan susrat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pelatihan	
24	20	Jumlah peserta		Berkurangny	Kekurangan	pemantauan	CE	pemberihan	

		pelatihan E-Training tidak sesuai target		a jumlah peserta antara offline dan online	peserta saat pelatihan offline	secara intens saat pelatihan online		pemahaman dan surat pernyataan kesanggupan mengikuti pelatihan sampai selesai	
13	21	Kesulitan mencari calon peserta di BLK Komunitas	Kurangnya koordinasi	Letak BLK Komunitas yang jauh	Target peserta pelatihan tidak terpenuhi	koordinasi dengan PIC BLKK agar bisa mendapat 16 peserta	E	penundaan pencairan dana bilamana belum didapat jumlah peserta yang sesuai	
18	22	Administrasi di LPK berpotensi tidak sesuai dengan Juknis	Pemberian informasi yang kurang lengkap	Stakeholder tidak segera untuk bisa memenuhi kekurangan administrasi	Perbedaan persepsi dan pencetakan dokumen laporan	pemberian format / tempate yang seragam	E	Koordinasi secara intensif dengan pengelola LPK	
1	23	Tidak terpenuhinya target jumlah peserta PFLK		Stakeholder hanya minat di program pelatihan tertentu	Target peserta dan target PNB tidak terpenuhi	melakukann koordinasi dengan stageholder PFLK	E	Pembuatan RAB yang sesuai peraturan sehingga stageholder bisa melakukan kegiatan PFLK di BPVP	
22	24	Keterlambatan penyelesaian laporan kegiatan PBK di UPTD	Kurangnya pengawasan terhadap proses perencanaan kegiatan	Keterbatasan SDM yang kompeten	Pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sesuai target dan rencana	Monitoring evaluasi dengan PIC kegiatan di UPTD	CE	Koordinasi dengan PIC kegiatan di UPTD	Punishment berupa pengurangan jumlah paket pelatihan pada tahun berikutnya
9	25	Pelaporan pertanggungjawaban (SPJ) terlambat dilaporkan	SDM PIC Pelaksana UPTD kurang melakukan penekanan target pengumpulan SPJ	UPTD lambat dalam pembuatan SPJ	Kelengkapan administrasi pelaporan akan terlambat dilaporkan	Memberikan tenggat waktu pengumpulan Laporan Kegiatan	E	Koordinasi dan terus mengingatkan terkait pembuatan dan pengumpulan SPJ	Punishment berupa pengurangan jumlah paket pelatihan pada tahun berikutnya
12	26	Implementasi 5S belum menyeluruh ke tiap bidang dan kejuruan	Belum ada masukan dan usulan kegiatan dari bidang/kejuruan sesuai dengan kebutuhan	-	Penerapan 5S belum maksimal dan menyeluruh	Melakukan Pemerataan perbaikan dan penerapan 5S ke seluruh bidang	E	Melakukan komunikasi dan menerima masukan/usulan dari tiap bidang/kejuruan	

5	27	Penyesuaian gelar dan alih jenjang kataegori pegawai terlambat		Menunggu pedoman dan peraturan terbit	keterlambatan penyesuaian administrasi pegawai	koordinasi dengan kantor pusat	E	menginformasikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk kelengkapan dokumen	
6	28	Pemeliharaan Gedung dan Peralatan pelatihan tidak sepenuhnya terpelihara	Kerusakan terjadi secara bergantian di tiap bidang ataupun kejuruan	0	Banyak sarana prasarana yang masih mengalami kerusakan	selalu menerima laporan kerusakan untuk ditindak lanjuti	CE	koordinasi dan penentuan skala prioritas kerusakan yang akan dipelihara/diperbaiki	
14	29	Belanja modal peralatan dan mesin tidak semua bidang terpenuhi	Pembelian berdasarkan skala prioritas permohonan	0	beberapa bidang belum bisa diupdate peralatannya	penentuan berdasarkan sekala prioritas	E	menyesuaikan anggaran dengan prioritas yang akan dibelanjakan	
11	30	Revisi anggaran terlambat diajukan	Penyisiran anggaran ada yang terlewat	Batas waktu sudah ditentukan	pelaksanaan kegiatan terhambat	koordinasi dan pemantauan anggaran kegiatan	E	Rapat menejemen setiap bulan dan triwulan	
19	31	Kesalahan Pencatatan transaksi keuangan dan aset	keterbatasan personil SDM yang mencatat	0	Terjadi selisih jumlah aset yang terdata	sinkronisasi data secara berkala	CE	penambahan SDM untuk membantu pencatatan keuangan dan aset	
32	32	Pembuatan dan penggandaan laporan memerlukan waktu yang relatif panjang	pembuatan dokumen dengan personil yang terbatas	Pihak percetakan memerlukan waktu yang sedikit lama	dokumen laporan lmbat dicetak	pembuatan dokumen dalam waktu yang terjadwal	CE	koordinasi dengan pihak percetakan dokumen	

Mengetahui,
Kepala

Amran, ST
NIP. 19830312 200901 1 014

KENDARI, Januari 2024
Ketua Satgas SPIP
Kasubag Umum

Anshari,S.Sos.,M.Si
NIP. 19770731 200312 1 005

KERTAS KERJA EVALUASI (KKE) INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Unit Kerja : Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari

Program : Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Nomor Risiko	Nama Risiko	Kegiatan yang Sudah ada	Kegiatan Pengendalian Yg Akan dibangun		Infokom yang sudah ada	Informasi yang akan dibuat	Komunikasi	Ditujukan	Waktu	PIC
			Pencegahan	Mitigasi						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Waktu Pembangunan / Renovasi tidak sesuai jadwal rencana	Melakukan monitoring pekerjaan secara rutin setiap minggu	Koordinasi dengan biro umum	Evaluasi pekerjaan secara periodik (mingguan, bulanan, triwulan)	Papan informasi proyek; kontrak kerja	Rapat Progres capaian kerja	Rapat evaluasi	Penyedia Jasa	Seminggu sekali	Bagian umum, PPK dan tim pengadaan
2	Waktu Pembangunan miniatur tambang tidak sesuai jadwal rencana	Melakukan monitoring pekerjaan secara rutin setiap minggu	Koordinasi dengan biro umum	Evaluasi pekerjaan secara periodik (mingguan, bulanan, triwulan)	Papan informasi proyek; kontrak kerja	Rapat Progres capaian kerja	Rapat evaluasi	Penyedia Jasa	minggu sekali	Bagian umum, PPK dan tim pengadaan
3	Promosi kurang sampai ke masyarakat luas dan industri	Melakukan Promosi Di media Sosial	Pembuatan banner dan video promosi di media Sosial	Sosialisasi ke sekolah-sekolah dan kelurahan	Media Sosial, Brosur	Perjanjian Kerjasama	Surat	Perusahaan dan Pemerintah setempat	Sepanjang Tahun	bidang pemberdayaan, tim promosi, tim humas
4	Tracing data alumni kurang lengkap	Penyebaran Link Survey	Sosialisasi dan penekanan informasi pentingnya pengisian link survey kepada peserta	Pengambilan sertifikat mewajibkan alumni mengisi link survey kebekerjaan	Link Survey, Media Sosial	Kegiatan Temu Alumni	Media Sosial	Alumni	Sepanjang Tahun	bidang pemberdayaan, tim promosi, tim humas

			pelatihan saat apel pagi							
5	Jumlah masyarakat yang menggunakan layanan kios siapkerja sedikit	Sosialisai Ke Security sebagai garda terdepan pelayanan	Memberi arahan kepada security untuk mengarahkan dan menunjukkan kios siap kerja	Pembuatan banner pelayanan kios siap Kerja	Banner	Pengumuman di Media Sosial	Media Sosial	Masyarakat Umum	Sepanjang Tahun	bidang pemberdayaan, tim promosi, tim humas
6	Rapat FKLPI masih belum bisa menunjukkan data pasar kerja yang akurat di wilayah Kalimantan Timur	Rapat dan Evaluasi Kerja FKLPI	Berdiskusi dan pemetaan kebutuhan pelatihan dengan DU/DI	Pembuatan program baru yang disesuaikan permintaan perusahaan	Data perusahaan	Data kebutuhan Pasar	Surat, Notulen	Anggota FKLPI, DUDI	Triwulan	Bidang Pemberdayaan, tim humas
7	Keterbatasan jumlah peserta yang dapat mengikuti bimbingan dan konsultasi produktivitas	Rapat Koordinasi	Membuat matrik pelaksanaan pengukuran peningkatan produktivitas		Surat koordinasi	Jadwal Pelaksanaan pengukuran produktivitas	Surat	UMKM, DU/DI	Triwulan	Bidang Produktivitas, tim humas
8	Keterbatasan pernosil yang dapat melakukan pengukuran peningkatan produktivitas di Perusahaan	Pelatihan Instruktur Produktivitas untuk Pegawai BPVP	Membuat matrik pelaksanaan pengukuran peningkatan produktivitas As		Surat Tugas	Jadwal Pelaksanaan	Surat dan Jadwal	Pegawai BPVP dan Mitra Perusahaan	Per Kegiatan	Bidang Produktivitas, tim instruktur produktivitas
9	Jumlah peserta dan waktu pelaksanaan	Rapat Internal	Memberikan informasi menggunakan surat		Brosur dan media Sosial	Surat Pemberitahuan	Surat,Media Sosial,Brosur	Masyarakat Umum	Per Kegiatan	Bidang Produktivitas, tim instruktur

	pelatihan tidak sesuai target		atau selebaran via media sosial							produktivitas
10	Umur peserta lomba tidak dapat melanjutkan kompetisi di tingkat Asia/dunia	Rapat Koordinasi dengan Pusat	Penambahan SDM dalam proses seleksi tingkat daerah	Sanksi administrasi berupa diskualifikasi kepesertaan kompetisi	Peraturan Kompetisi	MTP	Surat	Panitia dan Masyarakat	Per Kegiatan	Bidang Pemberdayaan, Bidang Penyelenggaraan, Bagian Umum
11	Narasumber yang kompeten untuk pelaksanaan kegiatan Telent Corner terbatas	Koordinasi dengan Komunitas atau Asosiasi	Mencari rekomendasi instruktur yang kompeten dari asosiasi/komunitas		Surat	Dokumen Kerjasama	Surat	Komunitas Dan Asosiasi	Per Kegiatan	Bidang Pemberdayaan, Bidang Penyelenggaraan.
12	Penyusunan program dan modul tidak sesuai dengan rencana	Study Banding	Evaluasi dan perbaikan dari hasil percobaan pembuatan inovasi		Proposal Inovasi Program	Pembuatan Program	Surat Proposal	Tim Inovasi dan INTALA		Bidang Pemberdayaan, tim inovasi program
13	Jumlah peserta kegiatan RCC Asesor Kompetensi tidak terpenuhi	pemilihan data peserta RCC	Mencari peserta pengganti dari data asesor di LSP		Data calon peserta RCC, Surat pemanggilan	Data perubahan peserta	surat pemanggilan	Asesor LSP P2 BPVP	Per kegiatan	Bidang Pemberdayaan, Tim LSP dan Asesor
14	Tidak terpenuhinya Tempat Uji Kompetensi sesuai Standar	Monitoring evaluasi TUK UJK	Memundurkan jadwal UJK agar TUK mempunyai waktu melengkapi peralatan		Catatan hasil Monev	Surat rekomendasi tindak lanjut	surat	TUK UJK	Per kegiatan	Tim LSP, PIC UPTD, Bagian Umum
15	LSP P2 BPVP Kendari belum memiliki	Koordinasi dengan LSP P3	Mengajukan surat permohonan UJK		Dokumen Perjanjian	Surat permohonan	Surat	LSP P3 terkait	Per kegiatan	Tim LSP, Bidang Penyelenggaraan,

	skema sertifikasi		dengan LSP P3		Kerjasama					dan instruktur
16	Jumlah kompetitor pada masing-masing bidang lomba tidak terpenuhi sesuai target	Pengumuman pendaftaran di media sosial	Pengontrolan jumlah pendaftaran kompetisi secara intens	Koordinasi kepada stageholder terkait untuk pengembangan kompetensi kompetitor	informasi dan pengumuman pelaksanaan kegiatan	surat undangan dan link pendaftaran lomba	surat, media sosial	calon kompetitor	per kegiatan	Bidang pemberdayaan, bidang penyelenggaraan, bagian umum
17	Kesesuaian kondisi sarana prasarana lomba tidak sesuai MTP/standar KKIN	Inventarisir sarana dan prasarana yang layak dan tidak layak	Melakukan Revitalisasi sarana dan prasarana di tiap bidang lomba sesuai standar		dokumen hasil inventarisir	pemeliharaan dan pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	surat, catatan, internal memo	bagian umum, pengadaan, pic workshop dan vendor	per kegiatan	Bagian umum, tim teknis dan tim sarana prasarana
18	Beberapa program pelatihan PBK level operator dilaksanakan tidak sesuai dengan timeline yang ada	perubahan matrik agenda pembukaan pelatihan	Terus promosi terkait program pelatihan di BPVP KENDARI		media sosial, brosur	penyesuaian waktu pembukaan pelatihan	media sosial, brosur	instruktur dan masyarakat umum	per batch kegiatan	bidang pemberdayaan dan bidang penyelenggaraan
19	Jumlah lulusan pelatihan teknis tidak sesuai target	nominatif siswa dan jadwal pelaksanaan pelatihan teknis	Pembuatan surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pelatihan		SK, jadwal pelatihan, surat pernyataan	surat peringatan	surat	peserta pelatihan teknis	sepanjang kegiatan	Bidang penyelenggaraan, tim instruktur, KKI
20	Jumlah peserta pelatihan E-Training tidak sesuai target	Pembuatan timeline kegiatan pelatihan e-training	pemberian pemahaman dan surat pernyataan kesanggupan mengikuti pelatihan sampai selesai		informasi di media sosial	brosur atau surat	media sosial, brosur, surat	masyarakat Umum calon peserta pelatihan e training	per kegiatan	Bidang pemberdayaan, tim instruktur

21	Kesulitan mencari calon peserta di BLK Komunitas	koordinasi dengan PIC BLK Komunitas	penundaan pencairan dana bilamana belum didapat jumlah peserta yang sesuai		Surat koordinasi	-	surat	PIC BLK Komunitas	sepanjang tahun	Bagian Umum, PPK dan tim verifikasi BLK Komunitas
22	Administrasi di LPK berpotensi tidak sesuai dengan Juknis	Pemberian informasi dokumen pelaksanaan pelatihan	Koordinasi secara intensif dengan pengelola LPK		Surat koordinasi	-	surat	penanggung jawab LPK	Sepanjang tahun	Bidang Pemberdayaan
23	Tidak terpenuhinya target jumlah peserta PFLK	penjajakan kerjasama dengan stakeholder terkait	Pembuatan RAB yang sesuai peraturan sehingga stakeholder bisa melakukan kegiatan PFLK di BPVP		RAB program pelatihan PFLK	RAB penyesuaian dengan peraturan terbaru	dokumen RAB, Surat	stakeholder terkait, bidang pemberdayaan	sepanjang tahun	Bidang pemberdayaan, tim instruktur
24	Keterlambatan penyelesaian laporan kegiatan PBK di UPTD	Rapat koordinasi bersama pengelola BLK UPTD	Koordinasi dengan PIC kegiatan di UPTD	Punishment berupa pengurangan jumlah paket pelatihan pada tahun berikutnya	Monev di BLK UPTD	Surat pemberitahuan untuk menyelesaikan laporan sesuai target	surat	penanggung jawab kegiatan di BLK UPTD	sepanjang tahun	Bagian umum, tim verifikasi UPTD, PPK UPTD
25	Pelaporan pertanggungjawaban (SPJ) terlambat dilaporkan	Rapat koordinasi bersama pengelola BLK UPTD	Koordinasi dan terus mengingatkan terkait pembuatan dan pengumpulan SPJ	Punishment berupa pengurangan jumlah paket pelatihan pada tahun berikutnya	Monev di BLK UPTD	Surat pemberitahuan untuk menyelesaikan laporan sesuai target	surat	penanggung jawab kegiatan di BLK UPTD	sepanjang tahun	Bagian umum, tim verifikasi UPTD, PPK UPTD
26	Implementasi 5S belum	koordinasi dengan	Melakukan komunikasi		Rapat bersama	Kesepakatan	watshap group	tim 5S	Sepanjang	Bagian Umum,

	memyeluruh ke tiap bidang dan kejuruan	tim 5S untuk pelaksanaan kegiatan implementasi 5S	dan menerima masukan/ulasan dari tiap bidang/kejuruan		tim 5S	waktu pelaksanaan implementasi 5S			tahun	tim 5S
27	Penyesuaian gelar dan alih jenjang kataegori pegawai terlambat	Koordinasi ke kepegawaian Setditjen Binalavotas	menginformasikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk kelengkapan dokumen		Daftar Nominatif Pegawai, Data Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional, ijazah terbaru, izin belajar	Informasi usulan penyesuaian gelar	Surat Pemberitahuan	Pegawai yang bersangkutan	sepanjang tahun anggaran	Bagian Umum
28	Pemeliharaan Gedung dan Peralatan pelatihan tidak sepenuhnya terpelihara	menerima laporan kerusakan dan inventarisir prioritas pemeliharaan	koordinasi dan penentuan skala prioritas kerusakan yang akan dipelihara/diperbaiki		Data laporan kerusakan	internal memo pemeliharaan	surat	bagian umum, tim pengadaan	sepanjang tahun anggaran	Bagian umum
29	Belanja modal peralatan dan mesin tidak semua bidang terpenuhi	mendata usulan belanja modal dari tiap bidang	menyesuaikan anggaran dengan prioritas yang akan dibelanjakan		data usulan	dokumen permohonan ke tim pengadaan	surat, internal memo	bagian umum, PPK, tim pengadaan	sepanjang tahun anggaran	bagian umum
30	Revisi anggaran terlambat diajukan	pemantauan kegiatan dan realisasi anggaran	Rapat manajemen setiap bulan dan triwulan		rapat progres realisasi	perubahan atau revisi anggaran penyesuaian	surat, notulen	bagian umum, KPA dan tim pgoram anggaran	setiap bulan, triwulan	bagian umum
31	Kesalahan	inventaris	penambah		data	pembar	dokume	tim BMN	sepanja	bagian

	Pencatatan transaksi keuangan dan aset	ir pencatatan aset dari tahun berjalan	n SDM untuk membantu pencatatan keuangan dan aset		aset tahun sebelumnya	uan data aset tahun berjalan	n, surat		ng tahun anggaran	umum
32	Pembuatan dan penggandaan laporan memerlukan waktu yang relatif panjang	membuat target penggandaan laporan	koordinasi dengan pihak percetakan dokumen		dokumen kegiatan tiap bulan	seluruh dokumen kegiatan, surat perintah pencetakan dokumen	dokumen, surat	tim kerja bisang masing-masing	sepanjang tahun anggaran	bagian umum, bidang pemberdayaan, bidang penyelenggaraan dan bidang produktivitas

Mengetahui,
Kepala

Amran, ST
NIP. 19830312 200901 1 014

KENDARI, Januari 2024
Ketua Satgas SPIP
Kasubag Umum

Anshari,S.Sos.,M.Si
NIP. 19770731 200312 1 005

KERTAS KERJA EVALUASI (KKE) MONITORING DAN PEMANTAUAN

Unit Kerja : Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari

Program : Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Nomor Risiko	Risiko	Keg Pengendalian Yang sudah ada	Keg Pengendalian Yg akan dibangun		Metode pemantauan yang sudah ada	Metode pemantauan yang akan digunakan	PIC	Waktu dan frekuensi pemantauan
			Pencegahan	Mitigasi				
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan Pengendalian							
1	Waktu Pembangunan/Renovasi tidak sesuai jadwal rencana	Melakukan monitoring pekerjaan secara rutin setiap minggu	Koordinasi dengan biro umum	Evaluasi pekerjaan secara periodik (mingguan, bulanan, triwulan)	Kepala memantau progres pembagunan/renovasi setiap minggu		Bagian umum, PPK dan tim pengadaan	Sepanjang tahun anggaran
2	Waktu Pembangunan miniatur tambang tidak sesuai jadwal rencana	Melakukan monitoring pekerjaan secara rutin setiap minggu	Koordinasi dengan biro umum	Evaluasi pekerjaan secara periodik (mingguan, bulanan, triwulan)	Kepala memantau progres pembagunan setiap minggu		Bagian umum, PPK dan tim pengadaan	Sepanjang tahun anggaran
3	Promosi kurang sampai ke masyarakat luas dan industri	Melakukan Promosi Di media Sosial	Pembuatan banner dan video promosi di media sosial	Sosialisasi ke sekolah-sekolah dan kelurahan	Kepala memantau promosi di media sosial	kepala akan terlibat dalam promosi ke tingkat sekolah/kelurahan/kecamatan	bidang pemberdayaan, tim promosi, tim humas	Sepanjang tahun anggaran
4	Tracing data alumni kurang lengkap	Penyebaran Link Survey	Sosialisasi dan penekanan informasi pentingnya pengisian link survey kepada peserta pelatihan saat apel pagi	Pengambilan sertifikat mewajibkan alumni mengisi link survey ke pekerjaan	kepala memantau data alumni setiap tahun		bidang pemberdayaan, tim promosi, tim humas	Sepanjang tahun anggaran
5	Jumlah masyarakat yang menggunakan layanan kios siapkerja sedikit	Sosialisasi Ke Security sebagai garda terdepan pelayanan	Memberi arahan kepada security untuk mengarahkan dan	Pembuatan banner pelayanan kios siap Kerja	Kepala memantau standar layanan dan sarana pelayanan di kios siap kerja		bidang pemberdayaan, tim promosi, tim humas	Sepanjang tahun anggaran

			menunjukkan kios siap kerja					
6	Rapat FKLPI masih belum bisa menunjukkan data pasar kerja yang akurat di wilayah Kalimantan Timur	Rapat dan Evaluasi Kerja FKLPI	Berdiskusi dan pemetaan kebutuhan pelatihan dengan DU/DI	Pembuatan program baru yang disesuaikan permintaan perusahaan	Kepala terlibat aktif dalam rapat FKLPI		Bidang Pemberdayaan, tim humas	Sepanjang tahun anggaran
7	Keterbatasan jumlah peserta yang dapat mengikuti bimbingan dan konsultasi produktivitas	Rapat Koordinasi	Membuat matrik pelaksanaan pengukuran peningkatan produktivitas		Kepala memantau kegiatan bimbingan konsultasi produktivitas		Bidang Produktivitas, tim humas	Sepanjang tahun anggaran
8	Keterbatasan pernosil yang dapat melakukan pengukuran peningkatan produktivitas di Perusahaan	Pelatihan Instruktur Produktivitas untuk Pegawai BPVP	Membuat matrik pelaksanaan pengukuran peningkatan produktivitas		Kepala memantau ketersediaan personil internal untuk pengukuran produktivitas		Bidang Produktivitas, tim instruktur produktivitas	Sepanjang tahun anggaran
9	Jumlah peserta dan waktu pelaksanaan pelatihan tidak sesuai target	Rapat Internal	Memberikan informasi menggunakan surat atau selebaran via media sosial		Rapat koordinasi perispan pelaksanaan kegiatan		Bidang Produktivitas, tim instruktur produktivitas	Sepanjang tahun anggaran
10	Umur peserta lomba tidak dapat melanjutkan kompetisi di tingkat Asia/dunia	Rapat Koodinasi dengan Pusat	Penambahan SDM dalam proses seleksi tingkat daerah	Sanksi administrasi berupa diskualifikasi kepesertaan kompetisi	Kepala memantau jumlah pendaftar dan administrasi pendaftar lomba	Rapat pleno seleksi pendaftar untuk mendapatkan kompetitor yang sesuai pedoman	Bidang Pemberdayaan, Bidang Penyelenggaraan, Bagian Umum	Per minggu, Per kegiatan
11	Narasumber yang kompeten untuk pelaksanaan kegiatan Telent Corner terbatas	Koordinasi dengan Komunitas atau Asosiasi	Mencari rekomendasi instruktur yang kompeten dari asosiasi/komunitas		Kepala memantau ketersediaan instruktur yang kompeten untuk talent corner		Bidang Pemberdayaan, Bidang Penyelenggaraan.	Per kegiatan
12	Penyusunan program dan modul tidak sesuai dengan rencana	Study Banding	Evaluasi dan perbaikan dari hasil percobaan pembuatan Inovasi		Kepala memantau progres penyusunan modul dan program	Rapat koordinasi dan pemberian batas waktu target penyelesaian	Bidang Pemberdayaan, tim inovasi program	Per kegiatan
13	Jumlah peserta kegiatan RCC Asesor	pemilahan data peserta RCC	Mencari peserta pengganti dari		Kepala memantau jumlah peserta dan		Bidang Pemberdayaan,	Per kegiatan

	Kompetensi tidak terpenuhi		data asesori di LSP		pelaksanaan kegiatan RCC		Tim LSP dan Asesor	
14	Tidak terpenuhinya Tempat Uji Kompetensi sesuai Standar	Monitoring evaluasi TUK UJK	Memundurkan jadwal UJK agar TUK mempunyai waktu melengkapi peralatan		Kepala memantau kemampuan TUK untuk melaksanakan UJK	Review pelaksanaan pelatihan dan pelaksanaan UJK	Tim LSP, PIC UPTD, Bagian Umum	Sepanjang tahun anggaran
15	LSP P2 BPVP Kendari belum memiliki skema sertifikasi	Koordinasi dengan LSP P3	Mengajukan surat permohonan UJK dengan LSP P3		Kepala memantau skema sertifikasi di LSP	Koordinasi dan surat permohonan kerjasama dengan LSP P3	Tim LSP, Bidang Penyelenggaraan, dan instruktur	Sepanjang tahun anggaran
16	Jumlah kompetitor pada masing-masing bidang lomba tidak terpenuhi sesuai target	Pengumuman pendaftaran di media sosial	Pengontrolan jumlah pendaftar kompetisi secara intens	Koordinasi kepada stakeholder terkait untuk pengembangan kompetensi kompetitor	Kepala memantau progres jumlah pendaftar tiap bidang lomba		Bidang pemberdayaan, bidang penyelenggaraan, bagian umum	per kegiatan
17	Kesesuaian kondisi sarana prasarana lomba tidak sesuai MTP/ standar KKIN	Inventarisir sarana dan prasarana yang layak dan tidak layak	Melakukan Revitalisasi sarana dan prasarana di tiap bidang lomba sesuai standar		kepala memantau kesiapan sarana prasarana untuk kegiatan lomba		Bagian umum, tim teknis dan tim sarana prasarana	seminggu sekali, per kegiatan
18	Beberapa program pelatihan PBK level operator dilaksanakan tidak sesuai dengan timeline yang ada	perubahan matrik agenda pembukaan pelatihan	Terus promosi terkait program pelatihan di BPVP Kendari		Kepala memantau target pelaksanaan program pelatihan secara periodik	review dan penyesuaian jenis program pelatihan yang akan dibuka	bidang pemberdayaan dan bidang penyelenggaraan	Sepanjang tahun anggaran
19	Jumlah lulusan pelatihan teknis tidak sesuai target	nominatif siswa dan jadwal pelaksanaan pelatihan teknis	Pembuatan surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan Pelatihan		Kepala memantau secara aktif pelaksanaan program teknis	memperketat proses seleksi program teknis	Bidang penyelenggaraan, tim instruktur, KKI	Sepanjang tahun anggaran
20	Jumlah peserta pelatihan E-Training tidak sesuai target	Pembuatan timeline kegiatan pelatihan e-training	pemberihan pemahaman dan surat pernyataan kesanggupan mengikuti pelatihan sampai selesai		Kepala memantau peserta pelatihan e-training saat online dan offline		Bidang pemberdayaan, tim instruktur	Per kegiatan

21	Kesulitan mencari calon peserta di BLK Komunitas	koordinasi dengan PIC BLK Komunitas	penundaan pencairan dana bilamana belum didapat jumlah peserta yang sesuai		Kepala memantau jumlah peserta pelatihan di BLK Komunitas	Koordinasi dengan PIC BLK Komunitas	Bagian Umum, PPK dan tim verifikasi BLK Komunitas	Sepanjang tahun anggaran
22	Administrasi di LPK berpotensi tidak sesuai dengan Juknis	Pemberian informasi dokumen pelaksanaan pelatihan	Koordinasi secara intensif dengan pengelola LPK		Kepala memantau pelaksanaan dan administrasi kegiatan		Bidang Pemberdayaan	Sepanjang tahun anggaran
23	Tidak terpenuhinya target jumlah peserta PFLK	penjajakan kerjasama dengan stageholder terkait	Pembuatan RAB yang sesuai peraturan sehingga stageholder bisa melakukan kegiatan PFLK di BPVP		Kepala memantau target pelaksanaan PFLK	Koordinasi dengan stageholder	Bidang pemberdayaan, tim instruktur	Sepanjang tahun anggaran
24	Keterlambatan penyelesaian laporan kegiatan PBK di UPTD	Rapat koordinasi bersama pengelola BLK UPTD	Koordinasi dengan PIC kegiatan di UPTD	Punishment berupa pengurangan jumlah paket pelatihan pada tahun berikutnya	Kepala memantau kelengkapan administrasi di BLK UPTD		Bagian umum, tim verifikasi UPTD, PPK UPTD	Sepanjang tahun anggaran
25	Pelaporan pertanggungjawaban (SPJ) terlambat dilaporkan	Rapat koordinasi bersama pengelola BLK UPTD	Koordinasi dan terus mengingatkan terkait pembuatan dan pengumpulan SPJ	Punishment berupa pengurangan jumlah paket pelatihan pada tahun berikutnya	Kepala memantau kelengkapan administrasi di BLK UPTD	Membuat surat peringatan target pengumpulan laporan pertanggungjawaban	Bagian umum, tim verifikasi UPTD, PPK UPTD	Sepanjang tahun anggaran
26	Implementasi 5S belum menyeluruh ke tiap bidang dan kejuruan	koordinasi dengan tim 5S untuk pelaksanaan kegiatan implementasi 5S	Melakukan komunikasi dan menerima masukan/usulan dari tiap bidang/kejuruan		Kepala memantau kegiatan Implementasi 5S		Bagian Umum, tim 5S	Sepanjang tahun anggaran
27	Penyesuaian gelar dan alih jenjang kataegori pegawai terlambat	Koordinasi ke kepegawaian Setditjen Binalavotas	menginformasikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk kelengkapan dokumen		Kepala memantau peraturan dan proses penyesuaian gelar pegawai	koordinasi dengan kantor pusat bagian kepegawaian	Bagian Umum	Sepanjang tahun anggaran

28	Pemeliharaan Gedung dan Peralatan pelatihan tidak sepenuhnya terpelihara	menerima laporan kerusakan dan inventarisir prioritas pemeliharaan	koordinasi dan penentuan skala prioritas kerusakan yang akan dipelihara/diperbaiki		Kepala memantau progres tindak lanjut pemeliharaan gedung dan peralatan pelatihan		Bagian umum	Sepanjang tahun anggaran
29	Belanja modal peralatan dan mesin tidak semua bidang terpenuhi	mendata usulan belanja modal dari tiap bidang	menyesuaikan anggaran dengan prioritas yang akan dibelanjakan		Kepala memantau kesediaan anggaran dengan skala prioritas yang akan dibelanjakan		bagian umum	Sepanjang tahun anggaran
30	Revisi anggaran terlambat diajukan	pemantauan kegiatan dan realisasi anggaran	Rapat manajemen setiap bulan dan Triwulan		Kepala memantau realisasi dan revisi anggaran		bagian umum	Sepanjang tahun anggaran
31	Kesalahan Pencatatan transaksi keuangan dan aset	inventarisir pencatatan aset dari tahun berjalan	penambahan SDM untuk membantu pencatatan keuangan dan aset		Kepala memantau data aset terbaru dan data penghapusan aset tahun berjalan		bagian umum	Sepanjang tahun anggaran
32	Pembuatan dan penggandaan laporan memerlukan waktu yang relatif panjang	membuat target penggandaan laporan	koordinasi dengan pihak percetakan dokumen		Kepala memantau finalisasi laporan tiap bidang		bagian umum, bidang pemberdayaan, bidang penyelenggaraan dan bidang produktivitas	Sepanjang tahun anggaran

Mengetahui,
Kepala

Amran, ST
NIP. 19830312 200901 1 014

KENDARI, Januari 2024
Ketua Satgas SPIP
Kasubag Umum

Anshari,S.Sos.,M.Si
NIP. 19770731 200312 1 005

